

**JARINGAN PERDAGANGAN PERANTARA ETNIK CINA DI PALEMBANG
DARI PERMULAAN ABAD KE-20 SAMPAI AKHIR KOLONIAL**

Oleh

Jumhari, SS

Drs. Refisrul

Iriani, S.Sos

Siti Rohanah, SS

**PROYEK PENGAJIAN DAN PEMANFAATAN SEJARAH DAN TRADISI PADANG
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG**

2004

**JARINGAN PERDAGANGAN PERANTARA ETNIK CINA DI PALEMBANG
DARI PERMULAAN ABAD KE-20 SAMPAI AKHIR KOLONIAL**

Oleh

Jumhari, SS

Drs. Refisrul

Iriani, S.Sos

Siti Rohanah, SS

**PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMANFAATAN SEJARAH DAN TRADISI PADANG
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG**

2004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian tentang “*Jaringan Perdagangan Perantara Etnik Cina di Palembang, dari Permulaan Abad Ke-20 Sampai Akhir Kolonial*” merupakan upaya rekonstruksi sejarah sosial ekonomi terkait dengan permasalahan jaringan perdagangan perantara etnik Cina di Palembang pada periode diatas, yang didalamnya mencakup beberapa hal seperti sejarah hubungan Palembang dengan orang Cina, pola pemukiman orang Cina di Palembang, kondisi sosial budayanya serta relasi antara perkembangan dan terbentuknya jaringan perdagangan kelompok etnik ini dengan kondisi perekonomian Palembang pada awal ke-20 sampai akhir kolonial

Palembang dalam perspektif kepentingan ekonomi kolonial pada periode diatas dianggap memiliki nilai strategis, yakni sebagai kawasan daerah-untung (*wingewesten*), yakni sejak ditemukannya sumber-sumber bahan tambang seperti minyak bumi dan timah serta komoditas pertanian yang laku di pasaran (kopi dan karet). Bahkan masa kemakmuran yang dinikmati oleh penduduk Palembang sebagai akibat melonjaknya harga karet serta naiknya permintaan pasar akan komoditas ini disebutnya sebagai penduduk setempat *oejan mas*.

Periode awal abad ke-20 juga merupakan periode, dimana jaringan perdagangan di Palembang berkembang pesat yang diwarnai pula dengan munculnya bentuk jaringan perdagangan berdasarkan ikatan etnis. Maka pada masa kelompok pedagang-pengusaha Cina di Palembang seperti *Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi* (transportasi) dan *NV*.

Palembang Rubber (karet) bersaing dengan kelompok pedagang besar dari Eropa seperti *Borsumij* (eksportir karet), *Escompto* (importir barang-barang mewah) dan kelompok pengusaha pribumi seperti Haji Akil dengan Firmanya Haji Akil serta Haji Anang dengan Firmanya Haji Anang.

Jaringan perdagangan perantara Cina di Palembang pada periode ini berkembang dan beroperasi mulai dari lingkup dusun, kota sampai ke lingkup nasional dan regional, yakni dari dusun di daerah pedalaman Palembang sampai ke Singapura. Mereka memiliki para *tengkulak* yang beroperasi di dusun sampai para *-tauke-* juragan yang memiliki kapital besar. Sebagai minoritas dagang etnik memiliki intuitif dan pengalaman berdagang yang diwariskan secara turun-temurun

Sebagai kelompok masyarakat perantau orang-orang Cina di Palembang sebagaimana umumnya orang Cina di Indonesia, secara psikologis mereka diperhadapkan dengan persoalan untuk mengatasi kesulitan hidup dan bagaimana cara mensiasatinya agar tetap *survival* dalam masyarakat. Landasan kultural yang dimiliki oleh warisan leluhur mereka yakni berupa nilai dan perilaku bisnis yang bersumber dari ajaran-jajaran filosofi Kung Fu Tze yang secara eksplisit menyokong dan lebih mengutamakan kepentingan duniawi, maka nilai-nilai seperti *hopeng*, *hong-sui* dan *hokie* lekat dalam praktek dalam manajemen dagang mereka

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kepada Bapak Dr. Nursyirwan Efendi, selaku Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan pengumpulan data hingga selesainya laporan penelitian ini terutama

kepada para nara sumber seperti; Bapak Hambali Hasan, Bapak Djohan Hanfiah, Ibu Nurhayati, Saudara Wilson serta Bapak Zulqayim; M.Hum sebagai konsultan serta rekan-rekan sejawat yang banyak memberikan dukungan moral.

Akhir kata *tak ada gading yang tak retak* penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga hasil laporan penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padang, November 2004
Ketua Tim,

Jumhari
NIP.132259117

KATA SAMBUTAN

Diskursus mengenai relasi antara kelompok etnik Cina dengan peranan ekonomi - perdagangan- mereka senantiasa menarik untuk diperbincangkan, baik dalam percaturan ekonomi lokal, nasional maupun regional. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dengan kemampuan ekonominya, kelompok ini di satu sisi dianggap memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain mereka acap kali menjadi sasaran dan tumba kemarahan serta kekecewaan dari kelompok pribumi atas terciptanya kesenjangan sosial ekonomi.

Dengan ketrampilan dan keuletannya, kelompok minoritas Cina menjadi lokomotif perekonomian di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dominansi kelompok etnik Cina dalam bidang ekonomi tidak diragukan lagi memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, meskipun dengan tidak mengabaikan sama sekali peranan kelompok-kelompok etnik pribumi lainnya seperti suku Minangkabau atau Bugis yang memang memiliki tradisi perdagangan dalam kultur mereka.

Jaringan perdagangan etnik Cina di Palembang pada permulaan abad ke-20 sampai akhir kolonial, tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan aktifitas perekonomian pemerintahan Kolonial yang menjadikan Palembang sebagai salah satu kawasan yang menguntungkan bagi kepentingan ekonomi mereka. Sehingga pada periode ini Palembang mengalami proses kapitalisasi, industriliasasi dan komersialisasi dalam bidang pertanian (kopi dan karet) yang cukup pesat.

Jaringan perdagangan perantara Cina di Palembang sudah ada sebelum Palembang berada dibawah hegemoni kolonial Belanda. Bahkan pada masa Kesultanan Palembang orang-orang Cina bersama orang-orang Arab di Palembang telah berperan sebagai penghubung (perantara) bagi pihak Kesultanan dengan para pedagang asing dalam aktifitas perdagangan.

Kebijakan kolonial yang diskriminatif terhadap penduduk pribumi dan orang Arab bila dibandingkan terhadap orang Cina mengakibatkan secara politik dan ekonomi orang Cina di Palembang lebih diuntungkan. Posisi yang diperoleh oleh Cina tidak sepenuhnya menyebabkan mereka menguasai sektor perdagangan, sebab tanpa adanya kultur dan jiwa wirausaha yang kuat mereka belum tentu mereka menjadi dominan dalam sektor perdagangan perantara.

Kami menyambut hasil penelitian ini sebagai upaya untuk mengeksplorasi serta menyebarluaskan informasi kesejarahan dan nilai budaya yang terkait dengan permasalahan jaringan perdagangan etnik Cina di Palembang pada periode diatas. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, November 2004
Kepala

Dr. Nursyirwan Effendi
NIP.131873989

DAFTAR TABEL

Tabel		Hai
1.	Produksi minyak bumi Sumatera 1924	39
2.	Produksi Batu Bara Palembang 1917-1930	39
3.	Penduduk Berdasarkan Etnik di Palembang 1930	40
4.	Ekspor karet rakyat dari daerah sentra karet di Hindia Belanda	47
5.	Distribusi produksi kopi dan karet antara pribumi dan swasta	48
6.	Bidang pekerjaan menurut kelompok etnik 1930	63
7.	Pekerjaan orang Cina dibidang yang menguntungkan 1930	64
8.	Statistik pajak pendapatn Hindia Belanda menurut gol penduduk 1939 ..	65

Daftar Gambar

Gambar :	Hal
1. Rumah Kapiten Cina (Kapiten Tjoa) terakhir Palembang di Kampung 7 Ulu	84
2. Ruang tengah tempat menerima tamu di kediaman Kapietn Tjoa	84
3. Kamar tempat peribadatan dan tempat menyimpan abu leluhur di rumah Kapiten Tjoa	85
4. Kompleks perumahan di sekitar rumah Kapiten Tjoa	85
5. Potret Kapiten Tjoa beserta anggota keluarganya	86
6. Kelenteng Soei Goeat Kiong (kelenteng tertua) di Palembang	87
7. Mesjid Agung Palembang	87
8. Benteng Kuto Besak	88
9. Pemandangan pemukiman Cina di Kampung 7 Ulu	88
10. Bapak Hambali pengurus BMA Sumatera Selatan	89
11. Bapak Johan Hanafiah seorang sejarawan dan budayawan Palembang	89
12. Bapak Princepes Partawijaya sekretaris Kelenteng Soei Goeat Kiong	90
Peta Palembang 1892	91

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II CINA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF SEJARAH.....	15
A. Geografi, Demografi dan Struktur Sosial Masyarakat Palembang	15
B. Sejarah Hubungan Palembang dengan Cina	23
C. Pola Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang	28
D. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Cina Di Palembang	31
BAB III PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PALEMBANG DARI PERMULAAN ABAD Ke-20 SAMPAI AKHIR KOLONIAL.....	36
A. Kapitalisasi dan Industrialisasi di Palembang	36
B. Komersialisasi Pertanian	44
C. Malaise di Palembang	50

BAB IV	JARINGAN PERDAGANGAN PERANTARA CINA DI PALEMBANG DARI PERMULAAN ABAD Ke-20 SAMPAI AKHIR KOLONIAL	56
	A. Jaringan Perdagangan Perantara Cina di Palembang	56
	B. Kultur Wirausaha dan Perilaku Bisnis Orang Cina	66
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	DAFTAR INFORMAN	82
	Lampiran	
	-Foto	
	- Peta	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai relasi antara kelompok etnik Cina dengan peranan ekonomi-perdagangan- mereka senantiasa menarik untuk diperbincangkan, baik dalam percaturan ekonomi lokal, nasional maupun regional. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dengan kemampuan ekonominya, kelompok ini di satu sisi dianggap memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain mereka acap kali menjadi sasaran dan tumba kemarahan serta kekecewaan dari kelompok pribumi atas terciptanya kesenjangan sosial ekonomi.¹

Dengan ketrampilan dan keuletannya, kelompok minoritas Cina menjadi lokomotif perekonomian di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.² Dominansi kelompok etnik Cina dalam bidang ekonomi tidak diragukan lagi memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, meskipun dengan tidak mengabaikan sama sekali peranan kelompok-kelompok etnik pribumi lainnya seperti suku Minangkabau atau Bugis yang memang memiliki tradisi perdagangan dalam kultur mereka.

¹ Dalam sejarah kerusuhan rasial yang melibatkan etnik Cina dengan kelompok pribumi ditanah air kesenjangan dibidang ekonomi menjadi salah satu alasan munculnya kerusuhan, meskipun tidak mengabaikan faktor lain seperti politik maupun sosial budaya. Bahkan lahirnya gerakan nativisme dan revitalisme seperti SI dan gerakan sosial lainnya juga muncul karena alasan tersebut diatas. Untuk jelasnya baca karya Takashi Shiraishi, "Zaman Bergerak", *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Grafiti Press, Jakarta, 1997.

² Dominansi Cina dibidang ekonomi bukan lagi menjadi rahasia umum di negara-negara Asia Tenggara, kalau di negara kita mengenal Liem Sioe Liong (Soedono Salim), Tjian Kian Liong (William Soerdjaja), Prajoego Pangestu, James Riady, maka di Thailand kita mengenal Taipan Robert Kouck serta Liem Kiat Sieng (Malaysia) untuk jelasnya lihat Alexander Irwan, "Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional", dalam I. Wibowo (ed), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi, Masalah Cina*, Editor I. Wibowo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 75-97.

Cerita sukses kaum “*hoakiau*”³ tidaklah mereka peroleh dalam waktu singkat, akan tetapi melalui rentang waktu dan proses panjang selama dalam perantauan mereka di kawasan lautan selatan- Asia Tenggara- pada saat ini.⁴ Secara historis jalinan kontak perdagangan antara Cina dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara, telah berlangsung lama. Informasi tersebut setidaknya berdasarkan sumber-sumber lokal maupun dari berita (warta) yang ditulis oleh orang Cina yang pernah mengunjungi wilayah nusantara termasuk Palembang.⁵

Palembang dimasa lampau dikenal pula sebagai jembatan penghubung jaringan pusat- pusat perniagaan Indonesia bagian barat. Sejarah daerah ini dapat ditelusuri dan dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terpenting di Asia Tenggara yang mencapai kebesarannya semasa pemerintahan dinasti Syailendra (abad 7 sampai abad ke 9). Selain karena letaknya strategis, Palembang mampu menjaga dan mempertahankan hubungannya dengan dunia luar, khususnya penguasaan atas jaringan lalulintas kapal-kapal “antar-Asia”.⁶

Pamor Kerajaan Sriwijaya perlahan-lahan memudar dan sejak abad ke-11, seiring dengan munculnya kekuatan baru-Kerajaan Majapahit- yang berbasis di Jawa

³ Istilah *hoakiau* -chinese overseas- dipergunakan untuk menyebut kelompok Cina yang tinggal diperantauan. Istilah *Hoakiau* mulai memasyarakat di Indonesia berkat buku *Hoakiau di Indonesia* karya Pramoedia Ananta Toer, yang terbit pertama kali pada tahun 1960 oleh penerbit Bintang Press. Buku diterbitkan kembali setelah runtuhnya rezim Orba pada tahun 1998 oleh Penerbit Graha Budaya, Jakarta. Meskipun dalam hemat saya pribadi, buku ini terkesan sebagai buku pledoi Pramoedy Ananta Toer bagi kelompok ini, sehingga terkesan subjektif, meskipun tidak disangsikan banyak fakta sejarah yang dipergunakan dalam penulisan buku ini.

⁴ Untuk uraian menarik saudara I. Wibowo mengutip buku *Lords of the Rim* karya Sterling Segrave (London: Bantam Press, 1955), sebagai prolog cerita sukses Cina di kawasan Samudra Pasifik. Dalam buku ini dilukiskan bagaimana generasi pertama perantau Cina membangun kerajaannya di tanah yang sama kali berbeda dengan tanah leluhur mereka. Hal yang menarik bahwa generasi pertama ini, bukanlah kelompok pedagang sebagaimana anggapan masyarakat umum selama ini .

⁵ Seorang pendeta agama Budha I’ Tsing dari Tiongkok pernah singgah ke Palembang untuk beberapa waktu lamanya dalam perjalanan ke Nalanda (India) sebagai daerah pusat pengajaran agama Budha pada masa itu. Keterangan lain bisa dalam *Sejarah Nasional Indonesia II*, Marwati Djoened Poeponogoro dkk, Jakarta :Depdikbud, Balai Pustaka, 1993 hal 53-76.

⁶ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta :LP3ES, 2003 hal.4

Timur. Pengaruh kekuatan baru -kerajaan Majapahit- di wilayah Palembang-pun, pada akhirnya merosot pula oleh ketiadaan kontrol pusat yang memadai serta mulai berkembangnya kekuatan baru yakni kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Samudra Pasai, Malaka dan Demak. Transisi kekuasaan di Palembang pada periode ini ditandai dengan adanya pergolakan dan penentangan beberapa daerah vasal terhadap kekuasaan pusat (Kerajaan Majapahit), seperti percobaan pemberontakan yang gagal dilakukan oleh Parameswara.⁷

Ketiadaan otoritas yang *powerfull* di Palembang pada periode ini, memberikan implikasi termasuk munculnya kelompok perantau Cina di bawah pimpinan Liang Tau-ming mengambil kendali yang dalam batas tertentu bisa dipandang sebagai penguasa baru. Fase ini dipandang pula sebagai kurun waktu di mana pengaruh Cina di Palembang menemukan momentumnya dalam sejarah Palembang. Kelompok perantau Cina pada fase ini tidak saja berperan secara ekonomi, akan tetapi juga secara politik dan budaya memberikan saham pembentukan nilai-nilai sosial budaya Palembang di kemudian hari.⁸

Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan yang cukup dramatis, yakni sejak dimulainya penerapan kebijakan politik segregasi rasial yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang timpang, kelompok warga kelas satu ditempati oleh orang-orang Eropa, kelompok kedua orang Timur Asing seperti Cina, Arab dan bangsa

⁷ Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 89-90.

⁸ *Ibid.*,

Asia lainnya. Sedangkan mayoritas kelompok pribumi berada dalam strata sosial paling bawah.⁹

Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu. Maka di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial, seperti Batavia, Semarang termasuk pula Palembang dijumpai kampung-kampung berdasarkan kategori tersebut, seperti kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.¹⁰

Klasifikasi sosial disertai terbentuknya hunian (pemukiman) berdasarkan etnik diperkuat pula dengan kebijakan ekonomi kolonial, dimana kelompok Timur Asing dilarang menjalankan usaha pertanian serta memiliki tanah, sementara di sisi lain mereka diberikan keleluasan peran sebagai mediator (pedagang perantara) yang menjembatani kepentingan pribumi dengan pemerintah kolonial.¹¹ Wertheim menyebut mereka dengan *minoritas dagang*¹², peran istimewa yang diperoleh kelompok Cina inilah yang akhirnya menyebabkan posisi mereka seperti dua sisi ujung mata pisau. Pada satu sisi mereka diuntungkan dan disanjung oleh kaum kolonial, akan tetapi di sisi lain mereka kurang disukai oleh kelompok mayoritas pribumi

Palembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial disebut sebagai salah satu kawasan *wingesten* (daerah-untung). Sebab Palembang pada masa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan

⁹ Pramoedya Ananta Toer, *op.cit*, hal 123-128. Baca pula, Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001. Keterangan lainnya bisa dilihat buku Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghao*, Jakarta : Graffiti Press, 1995 juga karya W.F Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal 106-107.

¹⁰ Mona Lohanda, *op.cit*, hal 1-35.

¹¹ Liem Twan Djie, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

¹² W.F. Wertheim, *op.cit*

ekonomi secara pesat, yang ditandai dengan terbukanya Palembang sebagai kawasan eksploitasi perkebunan (tembakau, kopi dan karet) serta mulai dilakukannya eksplorasi di bidang pertambangan (minyak bumi dan batu bara).¹³

Selanjutnya pada permulaan abad XX pula di Palembang, tumbuh dan berkembang jaringan kepihalangan (permakelaran) berdasarkan aliansi etnik dan jenis komoditas perdagangan. Jaringan kepihalangan merupakan bagian dari mata rantai perdagangan secara lokal, nasional maupun regional.

Menyangkut peran ekonomi kelompok etnik Cina di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Palembang, bukan hal jamak lagi bahwa dominansi kelompok ini senantiasa menjadi obyek kajian. Akan tetapi kajian-kajian tersebut umumnya dalam lingkup perubahan dan kebijakan politik maupun ekonomi dalam lingkup lokal dan nasional terkait dengan konstelasi kekuasaan.

Dan tema-tema kajian tersebut pada umumnya tidak lepas dari perlakuan politik dan ekonomi penguasa terhadap etnik ini. Tetapi jarang yang lebih menfokuskan pada peran etnik sebagai kelompok pedagang perantara dalam lokalitas tertentu. Memang ada kajian mengenai hal ini yang ditulis oleh Liem Twan Djie, tetapi fokus kajiannya di Pulau Jawa.¹⁴ Padahal karakteristik serta pola kegiatan perdagangan di wilayah luar Jawa berbeda, baik di lihat dari pelaku utama (*main actors*), jenis komoditas, pola distribusi maupun jaringan perdagangan yang ada pada periode ini, hal inilah yang mendorong team penulis mengangkat tema tersebut.

Kajian mengenai ***“Jaringan Perdagangan Perantara Etnik Cina di Palembang, dari Permulaan Abad Ke-20 Sampai Akhir Kolonial”*** setidaknya berusaha mengisi

¹³ Mestika Zed, *op.cit*, hal 5.

¹⁴ Liem Twan Djie, *“Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa”*, Suatu Studi Ekonomi, Jakarta: Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde bersama PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

ruang kosong dalam penulisan dan kajian mengenai etnik Cina dalam perspektif sejarah lokal maupun nasional. Setidaknya kajian ini berusaha menyajikan informasi awal dan menjawab beberapa hal menyangkut peran yang dimainkan oleh kelompok etnik Cina dalam aspek perdagangan perantara tersebut.

B. Pembatasan masalah

Penelitian ini mengambil batasan spasial, kota Palembang dan kawasan sekitarnya. Sedangkan batasan temporal dari permulaan abad XX yakni pada era terjadinya proses kapitalisasi, industrialisasi, komersialisasi pertanian sampai terjadinya depresi ekonomi yang kemudian berlanjut sampai berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda di Palembang.

Permulaan awal abad XX dianggap sebagai awal bagi berkembangnya industrialisasi dan eksploitasi kolonial di Palembang sebagai salah satu implikasi dari penerapan kebijakan ekonomi liberal dan politik etis kaum kolonial. Sedangkan batasan akhir permasalahan mengambil berakhirnya pemerintahan Kolonial Belanda dengan argumentasi bahwa setelah pemerintahan Pendudukan Jepang sistem dan otoritas dalam bidang ekonomi tentunya berbeda. Akan tetapi batasan temporal tidaklah bersifat kaku, karena fakta dan peristiwa sejarah bagaimanapun merupakan suatu hal yang sifatnya berkesinambungan. Ada beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibahas dalam kajian ini, antara lain:

- a. Bagaimana jaringan bisnis perdagangan perantara etnik Cina berkembang di Palembang pada periode ini?
- b. Bagaimana kultur dan perilaku bisnis perdagangan perantara etnik Cina di Palembang pada periode ini?

C. Tujuan dan manfaat

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan sejauh mana peran perdagangan perantara orang-orang Cina di Palembang pada permulaan abad XX sampai berakhirnya kekuasaan kolonial. Aspek sosiologis-historis yang melandasi kemunculan peran fungsional pedagang perantara etnik Cina menjadi fokus utama kajian penelitian ini. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini setidaknya memberi gambaran awal mengenai peran perdagangan perantara Cina di Palembang pada periode tersebut

D. Kerangka Konseptual

Liem Twan Djie dalam tulisannya mengenai, “ *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa*”, *Suatu Studi Ekonomi*, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perdagangan antara adalah:

“*Cabang perdagangan yang menjadi mata rantai antara perdagangan besar-besaran dan/ atau industri di satu pihak dan perdagangan kecil dan / atau penduduk konsumen, masing-masing produsen di pihak lain.*”¹⁵

Pendapat lain mengenai pengertian perdagangan seperti disampaikan oleh Cator¹⁶, ia menyatakan perdagangan perantara merupakan mata rantai antara kedua-duanya, yakni perdagangan besar-besaran dan perdagangan eceran. Definisi lain yang hampir senada dikemukakan oleh Overeem¹⁷, yang mengatakan perdagangan perantara sebagai cabang perdagangan yang bekerja sama dalam pengalihan barang-barang dari pihak perdagangan yang terkonsentrasi ke pihak perdagangan distribusi.

Perdagangan perantara secara konseptual memiliki makna yang sama dengan fungsi tentang hubungan peran. Analogi perdagangan perantara hampir menyerupai

¹⁵ *Ibid.*, hal 3.

¹⁶ W.J.Cator, “The Economic Position of The Chinese in Netherlands-Indies”, dalam Liem Twan Djie *op.cit* hal 2.

¹⁷ *Ibid.*,

kerja broker(pialang). Mestika Zed mengutip identifikasi kepiialangan menurut Eric Wolf, yang menyatakan kepiialangan tumbuh subur dalam masyarakat yang lebih kompleks dan terbagi-bagi dalam banyak peran. Gejala tersebut muncul sebagai akibat keterlibatan kekuatan ekonomi-politik dari luar lingkungan pedesaan, khususnya pusat-pusat perdagangan atau kawasan perkotaan yang memiliki pembagian kerja relatif beragam dan jaringan perniagaan lebih luas¹⁸

Kajian mengenai *Jaringan Perdagangan Perantara Etnik Cina Di Palembang Pada Permulaan Abad Ke-20 Sampai Akhir Kolonial* pada penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengidentifikasi karakteristik serta model dari terbentuknya jaringan perdagangan perantara Cina di Palembang dan dikaitkan dengan kultur dan perilaku bisnis mereka. Peran orang Cina sebagai *middleman* di Palembang sebagaimana halnya dengan orang Cina lainnya di wilayah Hindia Belanda peran penguasa serta politik diskriminasi Kolonial berpengaruh kuat terhadap kemajuan dan kelancaran bisnis perdagangan kelompok etnik ini, termasuk di daerah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Djohan Hanafiah dalam bukunya, “ *Melayu-Jawa, Citra Budaya Sejarah Palembang* “,¹⁹ menyatakan secara eksplisit terutama pada Bab V yakni mengenai pengaruh kekuasaan Cina di Palembang pada masa pemerintahan Kaisar Ming. Penjelasan mengenai hubungan perdagangan dan politik antara Palembang dengan Cina disinggung pula. Karya Hanafiah ini setidaknya cukup representatif, dengan menggali penulisan Sejarah Palembang berdasarkan sumber-sumber lokal, kolonial serta sumber dari literatur Cina. Hanya sayangnya keterangan mengenai sejauh mana perdagangan

¹⁸Eric Wolf, *Aspects of Group Relations in a Complex Society: Mexico (American Anthropologist, 58, 1956)* hal . 1065-1078, dalam Mestika Zed, *op.cit*, hal 15.

¹⁹ Djohan Hanafiah, *op.cit*, hal 87-121.

perantara Cina berperan dalam perekonomian Palembang pada masa itu tidak disinggung oleh penulisnya.

Karya kedua dari Makmun Abdullah dkk, "*Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*",²⁰ pada Bab II sub Bab 6 mengenai, "*Kegiatan Ekonomi dan Pendidikan*", memaparkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Palembang permulaan abad XX, peran etnik Cina sebagai kelompok pedagang perantara selain etnik Arab dibahas meskipun tidak secara mendetail, karena sejak awal proyek penelitian lebih menfokuskan kegiatan perdagangan dan industri di Palembang secara umum.

Karya ketiga dari Alexander Irwan, dalam artikelnya "*Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional*",²¹ menguraikan rantai jaringan bisnis Cina di Palembang dengan menyebut contoh komoditas karet sebagai jenis komoditas yang melibatkan peran pedagang-pengusaha Cina dalam lingkup lokal (Sumatera Selatan), nasional dan regional. Jaringan bisnis perkebunan karet semula berada ditangan orang Melayu.

Pada dasawarsa tahun 1920-an ketika permintaan karet berkembang secara pesat, kendali bisnis diambil oleh orang-orang Cina. Bahkan pada periode selanjutnya tahun 1930-an sebagian bisnis perkebunan karet dikuasai oleh etnik ini. Jaringan regional bisnis ini setidaknya melibatkan pedagang-pengusaha dari negara tetangga, seperti Singapura, Bombay (India), Karachi (Pakistan), Sanghai serta Hongkong.

Kegiatan bisnis setidaknya melibatkan dua taipan papan atas pada masanya seperti, Oei Tiong Ham (konglomerat Hindia Belanda) dan Chu Shungyen. Artikel

²⁰ Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985.

²¹ Alexander Irwan, "*Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional*", dalam (I. Wibowo,ed), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi, Masalah Cina*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 75-97.

cukup menarik karena memberikan informasi bagaimana model jaringan bisnis Cina pada mulanya dibangun serta berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Hanya sayangnya penjelasan kelompok pedagang perantara-*tengkulak*- sebagai lapis pertama jaringan perdagangan tidak dibahas secara lengkap, mungkin karena fokusnya lebih bersifat transnasional.

Buku keempat, "*Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*",²² kumpulan tulisan para pakar yang cukup intens mengulas masalah yang Cina yang tergabung dalam Lembaga Studi Realino, setidaknya beberapa artikel dalam buku ini memaparkan substansi permasalahan klasik sebagaimana literatur Cina lainnya seperti kebijakan diskriminatif penguasa terhadap etnik baik secara politik maupun ekonomi.

Nilai plus buku setidaknya memasukan nilai-nilai filosofi dasar kepercayaan etnik Cina yang mejadi acuan moralitas dalam kegiatan ekonomi perdagangan. Sama halnya dengan beberapa buku yang membahas etnik Cina kelemahan mendasar buku ini ulasan yang diuraikannya cenderung subyektif, meskipun tetap mengutip sumber serta fakta sejarah yang cukup kredibel.

Buku kelima, "*Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa*", *Suatu Studi Ekonomi*, karya Liem Twan Djie. Buku ini setidaknya menjadi sumber inspirasi penelitian bagi penulis untuk mengkaji permasalahan yang sama sebagaimana karya Liem Twan Djie hanya fokus kajiannya bukan di Palembang. Secara konseptual memberikan gambaran awal, mengenai apa dan bagaimana kegiatan perdagangan perantara Cina tumbuh dan berkembang di Indonesia. Akan tetapi karena fokus kajiannya Jawa, maka tentunya akan berbeda pola dan karateristik bila kajiannya menyangkut Cina diluar Jawa termasuk Palembang.

²² Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986.

Buku keenam karya Kemas Ari, "*Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*"²³, mengulas keberadaan orang-orang Cina di Palembang dari aspek sejarah dan sosial budaya dari masa permulaan kekuasaan kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka. Buku juga menguraikan aspek-aspek sosial budaya seperti pola pemukiman, pola kepemimpinan, religi sampai ke masalah bahasa. Sayangnya pemaparan dan analisa penulis tidak menyinggung secara mengenai peran etnik in sebagai pedagang perantara secara lengkap. Karena sejak awal penulis buku lebih melihat aspek sosial budaya, sehingga aspek ekonomi dan perdagangan yang dimainkan oleh orang Cina di Palembang kurang akurat, karena tidak didukung dengan data dan dokumen yang memadai.

Buku terakhir karya Mestika Zed, "*Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*", dibandingkan karya-karya yang disebutkan diatas, buku lebih komprehensif setidaknya karena buku ini merupakan hasil Disertasi yang bersangkutan. Obyek kajian yang secara khusus menyoroti masalah kepialaman politik dan revolusi di Palembang tahun 1900-1950. Karya ini paling tidak bisa jadi kajian awal (pre study) mengenai peranan perdagangan perantara Cina di Palembang pada periode. Pembahasan mengenai bagaimana jaringan bisnis Cina berkembang di Palembang pada permulaan abad XX serta relasinya terhadap kelompok jaringan bisnis lainnya seperti kelompok pribumi dan pengusaha kolonial.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan

²³ Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya, 2003

masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (Louis Gottshalk, 1986 : 32). Metode penelitian tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Di mana antara tahapan permulaan dengan tahapan berikutnya saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar tahapan dalam metode sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu :

- a. Pencarian dan pengumpulan sumber data (heuristik), baik yang berupa sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan, baik yang bersifat sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber primer yang berkaitan dengan tema penelitian diatas tersebut antara lain; *De Petroleum-Bronnen van Palembang* koleksi Bat.Genootschap No.XV, 82 mengenai eksplorasi tambang minyak bumi, di peroleh dari dari Perpustakaan Nasional RI. Untuk memperkuat hasil tulisan penelusuran literatur (sumber sekunder) penulis lakukan dengan mengunjungi berbagai perpustakaan yang terdapat Kotamadya Palembang seperti; Perpustakaan Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, UNSRI, Dinas Pendidikan Nasional serta instansi terkait lainnya. Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para nara sumber memiliki otoritas yang berkaitan dengan tema penelitian diatas seperti pelaku usaha etnik Cina, Arab atau pribumi yang masih hidup, keturunan para pelaku usaha tersebut serta menjanging informasi dari lapangan dengan menggunakan pendekatan “*anilisis life history*”²⁴ dalam kaidah Ilmu Antropologi atau *sejarah lisan* dalam perspektif Ilmu Sejarah.²⁵

²⁴ Koentjaraningrat, “Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu” dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Koentjaraningrat,ed), Jakarta: Gramedia, hal 158-172.

²⁵ Terry Bigalke, “The Oral History Methode”, dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta : Lembaran Berita ARNAS, No.9 Oktober 1982, hal 77-83.

- b. Kritik, yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik *eksteren* dan kritik *interen*. Kritik *eksteren* ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentisitas* sumber) sedangkan kritik *interen* dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber)
- c. *Interpretasi*, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah.
- d.. *Historiografi*, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya *substantial* dan sehingga menghasilkan penulisan sejarah analistis struktural yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika

Penelitian mengenai *Jaringan Perdagangan Perantara Etnik Cina di Palembang Pada Permulaan Abad Ke-20 Sampai Akhir Kolonial* ini diuraikan dalam lima bab. Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari 7 sub-bab, yaitu: latar belakang, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan mengenai Cina Palembang dalam perspektif sejarah yang membahas mengenai beberapa hal seperti: geografi, demografi dan struktur sosial masyarakat Palembang, sejarah hubungan Palembang dengan orang Cina, pola pemukiman Cina di Palembang serta kondisi sosial budaya masyarakat Cina di Palembang.

Bab tiga menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Palembang dari permulaan abad ke-20 sampai akhir kolonial yakni mengulas beberapa hal seperti: kapitalisasi dan industriasi di Palembang, komersialisasi pertanian serta malaise di Palembang. Bab empat menguraikan mengenai jaringan perdagangan perantara Cina di Palembang dari permulaan abad ke-20 sampai akhir kolonial yang meliputi antara lain yaitu: kultur wirausaha dan perilaku bisnis orang Cina di Palembang. Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

CINA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Geografi, Demografi dan Struktur Sosial Masyarakat Palembang

Istilah nama Palembang memiliki banyak pengertian, secara etimologi kata Palembang menurut terjemahan R.J. Wilkinson dalam kamusnya *A Malay English Dictionary* (Singapore :1903)¹ merujuk pada kata dasarnya *lembang*. *Lembang* memiliki makna yang berarti tanah yang berlekuk, tanah yang rendah, akar yang membengkak karena terendam lama didalam air.

Pengertian lainnya menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer² *lembang* berarti kerut, lekung ataupun lekuk, pengertian yang sama juga dinyatakan oleh Dr. T. Iskandar dalam karyanya *Kamus Dewan*³ yang mengartikan *lembang* sebagai lembah, tanah lekuk, tanah yang rendah. Arti lainnya *lembang* berarti tidak tersusun rapi atau terserak-serak. Sementara menurut bahasa Melayu Palembang berarti air yang merembes atau rembesan air. Awalan Pa atau Pe menunjukkan keadaan atau tempat, sehingga makna Palembang berarti suatu tempat yang digenangi air

Menurut Sevenhoven⁴ Palembang berasal dari kata *lemba* yang berarti tempat tanah yang dihanyutkan ke tepi, sedangkan Stuerlel mengartikan sebagai tanah yang terdampar⁵, jelasnya pengertian Palembang merujuk pada tanah yang berair. Faktanya di Palembang tercatat 117 buah anak sungai yang mengalir di tengah kota ini.

¹ Dikutip dari Djohan Hanafiah, 1995, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 15.

² Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Edisi kedua, hal 854.

³ Dr. T. Iskandar, 1986, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Johan Hanafiah, *ibid.*,

⁴ J.L. Van Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Terjemahaan Sugarda Purbakawartja, Jakarta: Bhratara, 1971, hal 12

⁵ Djohan Hanafiah, *op.cit*

Beberapa penulis kolonial lain yang sempat mengunjungi Palembang melukiskan kawasan Palembang sebagai daerah yang selalu dikaitkan dengan ketergantungan penduduknya terhadap lalulintas perairan sungai. Bahkan sebagian besar daerah Palembang terletak dikawasan dataran rendah dengan beberapa sungai besar dan sungai kecil yang mengalir ke pantai timur pulau Sumatera. Kondisi yang demikian bukanlah khas kota Palembang saja, sebab daerah-daerah di Sumatera bagian selatan pada umumnya juga memiliki kondisi yang sama.⁶

Ketergantungan penduduknya kepada sungai juga tampak terlihat jelas dari banyaknya penduduk yang mendiami dan menjalankan aktifitas keseharian mereka yang menyandarkan pada keberadaan sungai. Arus lalulintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan antar kampung memanfaatkan sungai sebagai penghubungnya. Kondisi alam yang demikian bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk mengembangkan peradabannya.

Berdasarkan lingkungan geografisnya, Kota Palembang terletak di kaki Bukit Siguntang, posisinya sebelah menyebelah dengan Sungai Musi. Secara astronomi Palembang berada pada 2^o 58' LS dan 105^o BT. Palembang sebagaimana mana halnya dengan wilayah lain Nusantara beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2663 mm, sehingga Palembang beriklim lembab.⁷

Dalam bulan Mei, Juni dan Juli angin bertiup dari arah Tenggara dan Timur, pada bulan – bulan ini cuaca cenderung cerah. Air pasang mulai datang pada pertengahan bulan Mei dan berlangsung terus sampai pertengahan bulan November. Selebihnya dari bulan-bulan itu setiap tahunnya tidak ada air pasang, hanya ada air surut karena pada periode ini air dari daerah pedalaman mengalir sangat deras. Sehingga

⁶ *Ibid.*,

⁷ D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid III (cetakan ke-3), 's Gravenhage, Leiden, 1919, hal 270.

tidak mengherankan kalau keadaan ibukota Palembang dipengaruhi oleh adanya pasang surut ini. Karena adanya pasang surut ini permukaan kota Palembang sering mengalami naik turun air dari 10 sampai 16 kaki.⁸

Kota Palembang berada kira-kira 90 kilometer dari muara sungai Musi yang berujung di dekat Sungsang. Letak ini tampaknya telah dipilih dengan bijaksana, mengingat alur Sungai Musi yang lebar dan berhulu di kawasan pedalaman mampu dilayari oleh kapal-kapal besar. Selain itu Palembang berada 1 mil dari pertemuan Sungai Musi dengan sungai-sungai Ogan dan Komering yang berhulu di daerah pedalaman.⁹

Geomorfologi Sumatera Selatan sebagaimana halnya daerah lain di pulau Sumatera tidak terlepas dari struktur geologi pulau Sumatera. Kawasan ini memiliki gunung berapi yang masih aktif, sedangkan sisa satu-satunya erupsi muda hanyalah terdapat di bagian Selatan, yang saat ini menjadi lapisan sukadana. Kawasan ini pada masa pleotolin mengalami pelengkungan yang kemudian patah secara *longitudinal*, sehingga patahan sekarang menjadi lembah Semangko yang memanjang dari Teluk Semangko menuju ke bagian Utara sampai ke Sumatera Tengah.¹⁰ Di bagian pantai Barat terdapat dataran aluvial yang sempit dan berkelok-kelok, sementara di bagian Timurnya merupakan dataran aluvial yang lebar yang membentang dari ujung Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara.

Ibukota Palembang yang terletak di pantai Timur Pulau Sumatra, pada masa tertier muda mengalami penurunan (depresi) yang lambat-laun berakibat terjadinya proses pedangkalan. Sedangkan di bagian tertentu dari kota ini berada di permukaan air

⁸ J.L. van Sevenhoven, *op.cit* , , hal 11.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985, hal 12-13.

laut yang terbentuk dari proses sedimentasi. Di bagian Timur Laut merupakan dataran rendah yang merupakan kawasan berawa (10-100 m), di bagian Barat Daya merupakan kawasan perbukitan yang merupakan rangkaian Bukit Barisan serta jajaran pegunungan seperti Gunung Dempo (3173 m), Gunung Seblat (2383) dan Gunung Batak (2817 m).¹¹

Berdasarkan geomorfologinya pula, karakteristik lingkungan fisik daerah Palembang secara sederhana terdapat pola *iliran* dan *uluran*¹². Istilah ini merujuk pada kawasan dataran rendah dan dataran tinggi dalam terminologi masyarakat lokal Palembang. Perbedaan karakteristik wilayah pada gilirannya berimplikasi pada perbedaan sosial ekonomi dan kultur kedua pola tersebut.

Klasifikasi perbedaan kedua pola di atas setidaknya mulai menemukan wujudnya pada masa Kesultanan Palembang serta lebih intensif mengkrystal ketika Palembang berada di bawah hegemoni Kolonial Belanda. Dalam masyarakat tradisional kompleksitas hubungan status sosial dan ekonomi antara penguasa dengan kawulanya merupakan hal lazim kita temukan termasuk di wilayah ini.

Palembang pada masa pra kolonial merupakan ibu kota Kesultanan Palembang (1553-1814). Kemudian pada masa kolonial Belanda, kota tersebut dijadikan sebagai ibu kota Karesidenan Palembang. Karesidenan ini merupakan satu dari tiga karesidenan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Wilayah karesidenan Palembang di Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Bengkulu dan Lampung di bagian Selatannya, sedangkan bagian Utara berbagi batas pantai Timur Sumatera dengan tetangganya Jambi.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Konsep *iliran* dan *uluran* merupakan konsep zone geografis yang terbentuk dari kondisi realitas kenampakan fisik geologinya. Uraian menarik mengenai konsep ini dan pengaruhnya terhadap penduduk dapat dibaca dari buku Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal; 34-47.

Posisi geografis Palembang yang berada di dekat muara Sungai Musi serta terhubung dengan delapan anak sungai yang bermuara di sungai ini. Melalui anak-anak sungai tersebut lalu lintas perdagangan dan komunikasi antar penduduk baik yang tinggal di Ulu maupun Hilir terjalin. Selain itu posisi muara Sungai Musi yang menghadap ke Selat Bangka memiliki nilai strategis dan ekonomi, karena kedudukannya sebagai tempat penghubung (transit) antara Jawa dan Malaka.

Akibat dari posisi geografis di atas maka Palembang lebih berorientasi kepada kebudayaan sungai (*riverine culture*). Ada satu segi menarik akibat orientasi budaya Palembang tersebut, yakni lahirnya budaya material maupun non material yang terkait dengan hal tersebut. Pada masa kesultanan Palembang, perahu merupakan transportasi utama. Mereka menyebutnya *pancalang*,¹³ pancalang tidak hanya bermakna fisik semata ia juga merupakan simbol dari kebesaran para pembesar Kesultanan Palembang.

Pancalang merupakan sarana transportasi yang efektif pada masa Kesultanan Palembang. Kedatangan pancalang ke wilayah bawahan kesultanan bisa dimaknai sebagai bentuk datangnya restu maupun hukuman dari Sultan. Pancalang biasanya dikendalikan langsung oleh Sultan ataupun wakilnya. Daya jelajah pancalang terbukti efektif untuk menyusuri Sungai Musi maupun anak-anak sungainya, dengan didayung oleh puluhan orang, pancalang mampu menempuh muara Sungai Musi dalam beberapa

¹³ Ilustrasi menarik mengenai Pancalang di uraikan oleh Sevenhoven, sebagaimana halnya bentuk perahu fungsinya sebagai angkutan di daerah sungai. Hal yang terlihat istimewa, bahwa penggunaan perahu biasanya dipakai oleh kalangan tertentu dan secara simbolis warna perahu menunjukkan siapa yang berhak memakainya. Besarnya, warna dari dayungnya berbeda sesuai dengan pangkat pemilikinya. Hanya raja yang berhak memakai warna putih dan hitam, lainnya merah dengan baris-baris warna khusus.. Kelompok bangsawan termasuk para pangeran dan kerabat raja perahunya memakai tanda di atasnya berbentuk belah ketupat hitam. Pancalang berukuran panjang antara 40 sampai 70 dan 80 kaki, lebarnya dari 6 sampai 11 dan 12 kaki dengan jumlah pendayung antara 20-30 orang. Untuk jelasnya lihat Sevenhoven. *op.cit*, hal 16.

hari saja. Bahkan untuk menjangkau daerah pedalaman hanya tempuh dalam beberapa hari saja.¹⁴

Keberadaan pancalang beserta atribut serta komponen di dalamnya lebih jauh merefleksikan akan adanya hakikat nilai-nilai sosial didalamnya. Bahkan secara simbolis maupun konkret menunjukkan hubungan antara raja maupun kelompok kerabatnya sebagai penguasa dengan para pendayungnya sebagai bawahannya. Posisi para pendayung memiliki tempat yang khusus. Kelompok ini disebut dengan “*orang senen*” . Mereka bukanlah golongan budak, meski demikian dia tidak sepenuhnya merdeka. Loyalitas mereka sepenuhnya diabdikan kepada Sultan. Mereka pada umumnya berasal dari daerah Sikap

Pada masa Kesultanan Palembang penduduk Palembang dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok priyayi dan rakyat. Priyayi berarti keturunan raja atau kerabat raja, golongan priyayi dibagi lagi menjadi tiga golongan yaitu; pangeran, raden dan masaagus. Pangeran berasal dari kata pengheran yang berarti yang memerintah. Gelar ini hanya boleh diberikan oleh raja. Golongan raden berarti tinggi (luhur) sedangkan masaagus berarti berharga banyak.¹⁵ Untuk anak-anak perempuan dari keluarga priyayi mereka memiliki sebutan pula seperti; Istri Sultan gelar sebutannya ratu, kemudian untuk anak perempuan atau istri dari keluarga raden disebut raden ayu, sedangkan istri atau perempuan masaagus dipanggil asayu.¹⁶

Golongan rakyat kebanyakan dibagi dalam tiga golongan , yakni: golongan kiai-mas, kiai-agus dan rakyat jelata. Kiai-mas adalah laki-laki dari perkawinan seorang masayu dengan laki-laki dari rakyat biasa, sedangkan Kiai-agus adalah anak laki-laki dari keturunan raden yang kawin dengan rakyat biasa. Untuk kalangan rakyat

¹⁴ *Ibid.*, hal 17.

¹⁵ Sevenhoven, *op.cit*, hal 36

¹⁶ *Ibid.*, hal 26

kebanyakan dibedakan atas orang Miji, orang Senan dan orang-orang yang menggadaikan diri atau budak¹⁷

Selain penduduk pribumi pada masa Kesultanan Palembang telah tinggal orang-orang Cina dan Arab. Biasanya orang Cina tinggal di sungai-sungai dengan rumah rakitnya, sedangkan orang Arab telah mengelompok. Kedua golongan itu bergerak sebagai pedagang perantara. Tidak angka pasti berapa jumlah orang Cina dan Arab yang bermukim di Palembang pada masa kesultanan ini. Namun menurut taksiran Sevenhoven jumlah orang Arab sekitar 500 jiwa dan 800 jiwa.¹⁸

Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang pada tahun 1825, sebagai akibat kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin II, maka kota Palembang statusnya berubah menjadi daerah karesidenan.¹⁹ Karesidenan Palembang dibagi atas beberapa *afdeeling*, kecuali ibukota Palembang. Tiap-tiap *afdeeling* membawahi *onder-afdeeling* yang dipimpin oleh *contreleur* dan tiap-tiap *onder-afdeeling* terdiri dari marga-marga yang diperintah oleh seorang kepala marga atau seing disebut pasirah. Sedangkan ibukota Palembang sendiri dibagi dalam dua distrik yaitu Distrik Seberang Ulu dan Distrik Seberang Ilir.

Pada masa ini di seluruh wilayah Karesidenan Palembang terdapat 15 Distrik dan 40 onder-distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang Demang dan Asisten Demang, serta 174 marga yang terbagi dalam berbagai dusun dan kampung. Adapun pembnagian *afdeeling* dan *onder-afdeeling* di Karesidenan Palembang adalah sebagai berikut²⁰:

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hal 33

¹⁹ Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985, hal.49

²⁰ *Ibid.*,

1. Daerah Ibukota Palembang terbagi dalam dua distrik, yaitu:
 - a. Distrik Seberang Ilir
 - b. Distrik Seberang Ulu
2. *Afdeeling* Palembang Ilir atau (*Palembang Benendenlanden*) dengan ibu kotanya Sekayu, yang membawahi beberapa *onder-afdeeling*, yaitu:
 - a. *Onder-afdeeling* Musi Ilir (Sekayu)
 - b. *Onder-afdeeling* Banyuasin (Banyuasin dan talang Betutu)
 - c. *Onder-afdeeling* Rawas (Surulangun)
 - d. *Onder-afdeeling* Ogan Ilir (Tanjung Raja)
3. *Afdeeling* Palembang Ulu (*Palebangsche Bovenlanden*) ibukotanya Lahat, terbagi dalam beberapa *onder-afdeeling*, yaitu:
 - a. *Onder-afdeeling* Lematang Ulu (Lahat)
 - b. *Onder-afdeeling* Lematang Ilir (Muara Enim)
 - c. *Onder-afdeeling* Tanah Pasemah (Pagar Alam)
 - d. *Onder-afdeeling* Tebing Tinggi (Tebing Tinggi)
 - e. *Onder-afdeeling* Musi Ulu (Muara Bliti)
4. *Afdeeling* Ogan Ulu dan Komering dengan ibukota Baturaja, terbagi dalam beberapa *onder-afdeeling*, yaitu:
 - a. *Onder-afdeeling* Ogan Ulu (Lubuk Batang)
 - b. *Onder-afdeeling* Komering Ulu (Martapura)
 - c. *Onder-afdeeling* Muara Dua (Muara Dua)
 - d. *Onder-afdeeling* Komering Ilir (Kayu Agung)

B. Sejarah Hubungan Palembang dengan Cina

Perkiraan mengenai sejak kapan nama Palembang mulai lahir serta berhubungan dengan orang Cina, apakah pada masa Kerajaan Sriwijaya ataukah telah ada sebelum atau sesudah adanya kerajaan ini masih diperdebatkan.²¹ Beberapa kronik Cina menyebut *Chu-fan-chi* karya Chau Ju-kua tahun 1225 yang menyebut Palembang dengan sebutan *Pa-lin-fong* sebagai salah satu bawahan dari San-fo-tsi,²² sedangkan yang dimaksud San-fo-tsi menurut kronik *Ling-wai-tai-ta* karya Chau Ku-fei tahun 1178 adalah kerajaan *Chan-pi*(Jambi).²³ Ma Huan dalam laporan ekspedisinya dari kawasan laut selatan mendokumentasikan pengalaman dalam tulisannya yang berjudul *Yin-yai-Sheng-lan*(Pemandangan- pemandangan indah di sekitar Laut Selatan) tahun 1416, menyatakan bahwa Ku-kang merupakan negeri yang dahulunya disebut San-fo-tsi (San-bo-tsai).²⁴

Penafsiran yang berbeda mengenai pengertian San-fo-tsi dari sumber kronik Cina terlihat membingungkan, karena San-fo-tsi bisa diartikan sebagai Palembang ataupun Jambi. J.L. Moens, seorang ahli arkeologi dan pakar sejarah berkebangsaan Perancis berpendapat bahwa yang dimaksud San-fo-tsi bukan hanya satu kerajaan saja, ia menyarankan bahwa ahli sejarah harus membedakan “San-fo-tsi Palembang” dan “San-fo-tsi Melayu”.

²¹ Perdebatan mengenai *nomenklatur* Palembang muncul dari adanya penafsiran tempat dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli. Buchori (1989) menyebut *Palimbang* atau *Malimbang* sebagai nama *wanua* (kampung) mungkin telah ada pada masa kekuasaan Dapunta Hyang.

²²Friedrich Hirth & W.W. Rockhill ed, *Chau-Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the 12 th & 13 th centuries, entitled Chu-fan-chi*, Oriental Press, Amsterdam, 1966, hal 60-67.

²³ O.W. Wolters, *The Fallof Sriwijaya in Malay History*. Singapura: Oxford University Press, 1970.

²⁴ Ma-Huan, *Ying-Yai Sheng-lan*, "The Overall Survey of the Ocean's Shores" (1433) terjemahan dari bahasa Cina oleh Feng Ch'eng-chun, pengantar, catatan dan appendix oleh J.V.G. Mills, Cambridge:University Press, 1970, hal 98-102, dalam Djohan Hanafiah, op.cit,

O.W.Wolters mengoreksi penafsiran yang berbeda diatas dengan mengutip pendapat Satyawati Sulaiman²⁵ yang menyatakan, bahwa pengertian San-fo-tsi adalah adanya tiga raja-raja, dimana salah satunya adalah raja Palembang. Sedangkan dua raja lain, kemungkinan penguasa Jambi dan kerajaan Melayu pedalaman, yang pernah diklaim oleh Kertanegara sebagai bawahannya pada paruh kedua abad ke-13, yang selanjutnya pernah dipimpin oleh Adityawarman pada periode berikutnya.

Perbedaan toponim San-fo-tsi, disinyalir oleh Moens mungkin diakibatkan dari kehati-hatian para pejabat Cina yang tidak pernah menggunakan kata Sriwijaya. Sebab Sriwijaya diintrepetasikan sebagai "*Tiga Vijaya*". Wolters sendiri juga curiga bahwa penamaan yang berbeda atas negara asing oleh pejabat Cina, mungkin saja didasarkan atas penyebutan nama tersebut dari utusan negara asing yang menghadap ke pejabat Cina tersebut.²⁶

Sebagai contoh seorang raja Sriwijaya pada awal tahun 960 M mengutus dutanya untuk pertama kali ke Cina pada masa dinasti Sung (960-1279). Mungkin saja Sriwijaya memberikan keterangan melalui dutanya, bahwa penguasa Sriwijaya pada waktu ini membawahi tiga negara tetangganya di Sumatera. Sehingga para penguasa Cina memperbaiki pengucapan dengan menyebutnya "*San fo-tsi*"²⁷.

Wolters kemudian membandingkan keterangan diatas dengan menghubungkan penafsiran toponim pada masa sebelumnya yakni masa Dinasti Tang (618-906) yang menyebut *Shi-li-fo-shih* (Sriwijaya). Sementara pada periode setelah dinasti Sung yakni masa pemerintahan Dinasti Yuan (1279-1368) tidak lagi menjelaskan mengenai San-fo-tsi, tetapi hanya menyebut "*Malayu*" dan "*Palembang*". Meskipun pada periode

²⁵ Satyawati Sulaiman, *He archeology and history of West Sumatra* dalam Bulletin of the Research Centre of Archaeology Indonesia, no:12, Jakarta, 1977 hal 10-11.

²⁶ O.W. Wolters, *Studying Sriwijaya* dalam MBRA vol 52 bagian 2, 1979, hal 23.

²⁷ San-fo-tsi dari kata san yang berarti tiga atau tiga wijaya sebagai satu kependekan lambang untuk pencatatan satu kerajaan penting.

selanjutnya masa pemerintahan Ming (1368-1644) mempergunakan istilah yang sama dari masa dinasti Sung.²⁸

Akhirnya Wolters menyimpulkan bahwa bagian utama dari Sriwijaya ada di masa awal Dinasti Sung. Kemungkinan selanjutnya mengapa mengalami penafsiran yang berbeda. Wolters lebih lanjut menyatakan mungkin saja terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam hubungannya dengan terjadinya perkawinan serta perubahan tempat pusat kekuasaan di wilayah ini berlangsung tanpa kekerasan. Terlepas dari itu semua, Wolters berpendapat bahwa bangsa Sriwijaya tidaklah menghilangkan toponim Melayu, yang muncul kembali dalam catatan abad ke-10 dan ke-14. Faktor melemahnya fungsi pelabuhan sebagai pusat perdagangan di muara sungai pada waktu itu memiliki kecenderungan memusatkan pada dunia orang-orang Sumatra dan adanya mata uang yang khusus pada regional tersebut sebagai ciri-ciri regional dan nama-nama tempat bahari.

Nama Palembang pada zaman klasik, selain terdapat dalam kronik Cina, juga tertulis dalam *Nagara Kartagama* karya Prapanca pada tahun 1365. Dalam pupuh XIII disebutkan negara-negara bawahan Majapahit di daerah Melayu antara lain: Jambi, Palembang, Dharmasraya, Toba dan sebagainya. Setelah masuknya Islam dan munculnya Kesultanan Palembang nama Palembang disebutkan secara familiar baik oleh *Babad Tanah Jawi* (1680) dan *Sejarah Melayu* (1612). Dalam *Sejarah Melayu* ada teks yang menyebutkan mengenai Palembang, yakni :

..ada sebuah negeri di tanah Andalas, Perlembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak-cucu Raja Sultan; Muara Tatang nama sungainya. Adapun negeri Perlembang itu, Palembang yang ada sekarang ini. Maka Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya; didalam sungai itu ada sebuah bukit Seguntang Mahameru namanya.²⁹

²⁸ Ibid.,

²⁹ Abdullah bin Abdul kadir Munsyi, *Sedjarah Melayu*, editor T.D. Situmorang dan Prof. Dr. A. Teeuw, Jakarta: Jambatan, 1958, hal 22.

Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya yang mungkin diperkirakan pada abad ke-12 berimbas dengan semakin surutnya posisi kerajaan ini sebagai kekuatan ekonomi dan politik pada abad-abad berikutnya. Munculnya Majapahit sebagai kekuatan baru dalam konstelasi politik nusantara pada masa menjelang keruntuhan Sriwijaya menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemunduran Sriwijaya di panggung sejarah peradaban nusantara.

Bahkan Majapahit menjadikan Palembang sebagai tempat yang strategis bagi ekspansi dan ambisi Majapahit di belahan Barat nusantara. Penaklukan Majapahit terhadap wilayah *Suwarnadwipa* diperkirakan sekitar tahun 1350. Untuk beberapa periode lamanya Palembang tenggelam di bawah bayang-bayang kebesaran Majapahit. Kebesaran Majapahit sebagaimana model politik kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional di nusantara lainnya berangsur-angsur memudar seiring dengan munculnya konflik internal serta berkembangnya kekuatan-kekuatan baru yang lebih progresif.

Persaingan dan rivalitas di antara penguasa lama dan baru seringkali muncul karena adanya alternatif-alternatif sistem baru maupun faham-faham baru yang berkembang dalam masyarakatnya. Kemudian perbedaan adopsi dan pemahaman nilai baru antara daerah pedalaman yang cenderung terisolir sebagaimana model pemerintahan yang dianut Majapahit cenderung bersifat sentralistik dan otokrasi bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah pantai yang cenderung memiliki pluralitas dan demokratis masyarakatnya.

Kemudian komunikasi serta rentang jarak yang jauh antara pusat kekuasaan dan wilayah kekuasaannya menjadikan Kerajaan Majapahit tidak sepenuhnya mampu mengontrol teritorialnya, termasuk dalam hal ini Palembang. Munculnya Islam sebagai

kekuatan baru di nusantara semakin memperlemah daya tawar Majapahit terhadap daerah-daerah yang masyarakatnya serta penguasanya telah masuk Islam.

Transisi dari satu kekuatan politik kepada kekuatan politik lain senantiasa diwarnai dengan instabilitas politik dan sosial dalam masyarakat. Dalam kasus Palembang Parameswara yang sebelumnya menjadi wakil penguasa Majapahit di Palembang, berbalik haluan dengan menentang hegemoni negara induknya pada tahun 1397. Usaha dari Parameswara tidak berhasil sepenuhnya, bahkan ia harus menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Majapahit dan akhirnya mengungsi ke Malaka.

Dalam kondisi tiadanya penguasa yang secara definitif dan *powerfull* di Palembang pada masa transisi ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang secara kultural memiliki pemimpin kelompok termasuk para petualang dan imigran Cina yang telah berada di Palembang pada masa kekuasaan sebelumnya (Sriwijaya). Semula orang-orang Majapahit mencoba menunjuk wakil mereka sebagai kepala di Palembang, akan tetapi langkah tersebut mendapat penolakan dari orang-orang Cina yang telah menetap lama di Palembang.

Bahkan sebagai tanggapan tindakan Majapahit tersebut, orang-orang Cina di Palembang mengangkat Liao Tiau-ming, salah seorang perompak dengan reputasi hebat sebagai pemimpinnya. Dokumen tertulis mengenai periode kepemimpinan dan aspek kekuasaan orang-orang Cina di Palembang pada periode ini tidak ada keterangan yang jelas, akan tetapi fakta sejarah tentang adanya para orang Cina yang menjadi "*raja*" di Palembang merupakan fakta sejarah yang terbantahkan.

Biasanya informasi mengenai perkembangan kerajaan dan penguasa di wilayah - *Nan Yang-Laut Selatan*³⁰ dan relasinya dengan penguasa Cina daratan didokumentasikan dalam bentuk kronik atau catatan perjalanan yang dilakukan oleh para utusan atau wakil baik dari penguasa wilayah yang menyatakan tunduk kepada penguasa Cina maupun sebaliknya laporan dari muhibah dari pejabat atau utusan resmi kekaisaran Cina yang berkunjung ke wilayah taklukan tersebut.

Informasi mengenai Palembang pada periode ini justru berasal dari laporan dari anak Liau Tiau-ming yang dibawa oleh komandan pertahanan kekaisaran bernama Sun Hsuan. Kaisar Yung Lo kemudian mengirim rombongan khusus ke Palembang di bawah pimpinan T'an Sheng-shou pada tanggal 20 Februari 1405. Informasi putera Liang Tau-ming mungkin merupakan sumber Cina yang utama, dimana sumber ini juga menguraikan tentang pencalonan orang Jawa, pemilihan umum untuk mengangkat Liau Tiau-ming serta kehancuran Palembang serta peristiwa-peristiwa yang membawanya ke Cina

C. Pola Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang.

Awal mula berkembangnya pemukiman Cina di Indonesia tidak lepas dari struktur pemukiman yang telah ada di Asia Tenggara pada masa lalu. Werner¹ Rutz menguraikan bahwa setidaknya ada lima tahapan perkembangan pemukiman.³¹ Pertama, pemukiman-pemukiman tua yang lebih banyak dibentuk oleh pengaruh Hindu India. Kedua, tradisi pemukiman pra Hindu Melayu, yang dikenal dengan sebutan kampung. Tahap ketiga adalah perkembangan struktur pemukiman yang ditandai dengan masuknya pendatang-pendatang yang berasal dari daratan Cina ke Asia Tenggara yang

³⁰ *Nan Yang – Laut Selatan* sekarang merupakan wilayah Asia Tenggara.

³¹ I. Wibowo, *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergaulan Etnik Cina Di Indonesia.*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 93.

umumnya bertujuan dagang. Keempat adalah tahap perkembangan struktur pemukiman modern yang dibangun oleh orang Eropa sekitar abad ke-17 seiring dengan masuknya Portugis, Spanyol dan Belanda. Tahap terakhir adalah terbentuknya berbagai pemukiman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dari lima tahapan tersebut, tahap ketiga sampai kelima akan berkaitan langsung dengan perkembangan pemukiman masyarakat Cina.

Uraian Rutz mengenai tahap perkembangan pemukiman masyarakat Cina diuraikan lebih jelas oleh Coppel, yang menyebutkan bahwa pemukiman kecil orang Cina sudah ada jauh sebelum kedatangan orang Eropa, terutama di bandar-bandar perdagangan disepanjang pantai utara Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukan di Indonesia, jumlah komunitas semakin bertambah. Pertumbuhan pesat terjadi ketika para emigran Cina datang seiring dengan meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam Indonesia. Contoh daerah yang mengalami penambahan jumlah peningkatan orang Cina akibat eksploitasi sumber-sumber alam seperti Pulau Bangka dan Belitung (tambang timah) dan Kalimantan Barat (tambang emas). Orang-orang Cina yang didatangkan ketiga daerah tersebut umumnya adalah penutur dialek Hakka, Teochiu, Hokkian, Kanton, dengan mayoritas adalah Hakka. Mereka ini semua bekerja sebagai buruh.³²

Disamping terbentuk akibat adanya aktivitas eksploitasi sumber daya alam, hampir sebagian besar pemukiman Cina terbentuk akibat proses perdagangan. Hal ini tampak di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti Jawa, Sulawesi dan sebagian besar wilayah Sumatera (kecuali Sumatera Timur yang merupakan pusat pemukiman Cina sebagai akibat aktifitas buruh pada perkebunan tembakau dan karet).

³²Charles Coppel, "*Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia*", dalam JAC Mackie (ed), *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, Hawaii: University Press, 1976, hal 1-5

Pemukiman orang Cina di Palembang, pada awalnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai sarana transportasi. Keadaan geografis Palembang yang terdiri dari daerah aliran sungai dan rawa-rawa, maka pola pemukimannya pun cenderung linear memanjang di tepian sungai atau tepian air yang dapat berfungsi sebagai sarana transportasi. Kecenderungan terhadap kebutuhan sungai memberi dampak bagi munculnya pemukiman linear berikutnya melapis pemukiman sebelumnya.³³

Pemukiman Cina pada masa kesultanan biasanya di bangun di atas rumah terapung "rumah rakit". Rumah rakit ini selain berfungsi sebagai tempat tinggal tinggal juga sekaligus berfungsi sebagai toko atau warung tempat jualan, bahkan berfungsi rumah penginapan. Dari keterangan menunjukkan bahwa pemukiman di atas sungai dimanfaatkan secara optimal oleh orang-orang Cina di Palembang pada masa ini.

Pada masa kekuasaan kolonial, pemukiman Cina di Palembang tidak mengalami perubahan berarti, sebab pemerintah kolonial Belanda lebih menitikberatkan pada pembangunan yang mengarah ke darat untuk pemukiman, perkantoran, maupun pusat-pusat perdagangan yang berlokasi di daerah Seberang Ilir. Pembangunan di Seberang Ilir menyebabkan pembangunan berkembang ke daerah Ulu meskipun tetap berorientasi ke sungai. Hal ini terjadi terutama dikawasan pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat perekonomian seperti Benteng Kuto Besak, Pasar Sekanan, Pasar 16 Ilir dan sebagainya.

Rumah-rumah rakit yang berada langsung di atas air tetap mempunyai pola linear hanya dari segi kuantitas jumlahnya berkurang, hal ini terjadi karena

³³ Retno Purwanti, *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang*, dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayarta* Volume 7 N0.2, Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002, hal 46.

perekembangan zaman, yang lambat laun membentuk rumah panggung.³⁴ Kondisi ini juga berlaku untuk orang-orang Cina yang berda di kampung 7 Ulu, seperti halnya pola pemukiman Cina pada umumnya terdapat rumah Kapiten Cina, kelenteng dan pemakaman Bukit Mahameru³⁵.

Bentuk arsitektur pemukiman Cina di Palembang terkesan unik, yakni membedakan dengan model rumah milik pribumi atau etnis lain seperti Arab. Arsitektur rumah-rumah Cina di Palembang pada umumnya merupakan arsitektur campuran dari unsur arsitektur lokal (Palembang), Cina dan Kolonial.

D. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Cina di Palembang

Kondisi sosial budaya masyarakat Cina secara umum, termasuk di Palembang terbentuk karena adanya politik pemisahan rasial oleh pemerintah kolonial. Struktur sosial masyarakat Hindia Belanda dibagi ke dalam golongan yakni: golongan lapisan atas (orang Eropa), Timur Asing (Arab, India dan Cina) dan yang paling pribumi. Kondisi ini semakin diperkokoh dengan adanya pengelompokan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu. Maka dikota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial, seperti Batavia, Semarang termasuk pula Palembang dijumpai kampung-

³⁴ *Ibid.*, hal 47

³⁵ Sampai saat ini rumah Kapiten masih berdiri kokoh yang ditempati oleh keturunan Kapiten Cina Tjoa Ham Hin, yakni keturunan ke-7, yaitu Tjoa Kok Lim di kampung 7 Ulu, rumah bekas kapiten Cina memiliki ukuran 164,9m x 85,6m yang terletak disebelah selatan sungai Musi, posisinya berseberangan dengan Benteng Kuto Besak, sekeliling rumah dibangun dengan konstruksi bangunan bata atau semi. seperti dinding rumah bagian belakang yang berfungsi sebagai pagar. Sedangkan kelenteng tertua yang masih ada tempatnya di kampung 10 Ulu, sekarang namanya kelenteng *Soei Goeat Kiong* (Chandra Nadi). Klenteng dibangun 1839 sebagai pengganti kelenteng tua di rumah kapiten Cina di 7 Ulu.. peninggalan kuno yang masih ditemukan didalam kelenteng antara lain; tegel berwarna merah dengan gambar berbentuk persegi delapan yang merupakan lambang *feng-shui* serta tiga patung utama yakni Patung Dewi *Kwan im* (Dewi pengasih), patung *Pao Sen* (Dewa Pengobatan) dan patung *Kwan Tun* (Dewa Kesehatan). Pada setiap perumahan milik orang Cina di Palembang sebagaimana rumah-rumah Cina pada umumnya, sering dijumpai simbol-simbol yang khas seperti terdapatnya ornamen-ornamen yang bercirikan sesuai dengan daerah leluhur mereka di daratan Cina. Simbol-simbol tersebut antara lain penolak bala seperti simbol keseimbangan kehidupan (*Yin dan Yang*), ataupun gambar-gambar dewa pelindung mereka. Pada rumah-rumah orang Cina sering dijumpai ukiran yang berbentuk naga dan kadang pula dipasang foto para leluhur mereka.

kampung berdasarkan kategori tersebut, seperti kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.³⁶

Maka pada masa ini setiap kelompok masyarakat memiliki kepala atau pimpinan. Jabatan pimpinan diberikan oleh pemerintah kolonial mirip dengan tingkatan jabatan militer, misalnya: Mayor, Kapiten dan Letnan.³⁷ Di Palembang Kapiten Arab yang pertama dijabat oleh Pangeran Syarif Abdurahman Al Habsyi. Sedangkan Kapiten Cina yang pertama di Palembang adalah Tjoa Ham Him pada tahun 1855.³⁸

Tugas seorang kapiten Cina antara lain sebagai perantara antara anggota masyarakatnya dengan pemerintah kolonial, menjaga keamanan dan ketertiban. Kapiten Cina mempunyai hak dan kewenangan untuk mengadili semua perkara yang ada dalam masyarakatnya. Selain itu ia memiliki kewajiban pula dalam masalah administrasi seperti mengurus surat kelahiran, surat kematian, surat nikah, surat cerai, surat jalan, surat wasiat dan melakukan penghitungan jumlah anggota masyarakatnya(sensus).³⁹ Dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda kedudukan seorang Kapiten Cina selain perantara, merangkap pula sebagai penasehat untuk pemerintah, terutama berkaitan dengan masalah penarikan pajak dan urusan menyangkut informasi hukum dan peraturan kolonial.

³⁶ Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001.,hal 1-35.

³⁷ Pangkat Militer Tituler adalah bentuk-bentuk kepangkatan yang ada atau berlaku pada kemiliteran. Kepangkatan militer diberikan untuk membedakan dengan masa sebelumnya, pada masa VOC sebutan Kapiten Cina tidak ada hubungan dengan pangkat dalam militer untuk jelasnya baca buku T.S.Wardoyo, *Tan jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, hal 152

³⁸ Eka Asih Putriana Taim, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang Dari Masa Ke masa*, dalam Jurnal Arkeologi *Siddhayarta* Volume 7 N0.2, Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002, hal 31.

³⁹ Wardoyo, *op.cit*,

Secara umum masyarakat Cina di Palembang lebih banyak terlibat dalam lapangan perdagangan. Keterlibatan mereka di sektor lebih banyak karena tekanan politis dari para penguasa setempat. Pada masa Kesultanan Palembang orang-orang Cina tidak diperbolehkan bertani dan memiliki tanah. Larangan ini semakin jelas dengan kebijakan Sulatan Palembang, yang hanya memperbolehkan Cina tinggal di rumah rakit disekitar sungai Musi.⁴⁰

Orang-orang Cina pada masa ini memperdagangkan barang-barang seperti barang pecah-belah, sutar kasar, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan dan barang-barang Cina lainnya. Sementara rekannya Orang Arab berdagang kain linen. Orang-orang pribumi biasanya memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan hutan seperti rotan, damar, kayu kaka, lilin dan lain sebagainya. Dalam berdagang bisanya mereka menggunakan perahu yang disebut *wangkang*, yang mirip dengan kapal atau jung Cina hanya ukurannya lebih kecil.⁴¹

Cina Palembang bukanlah kelompok masyarakat yang homogen, sebab mereka berasal dari berbagai macam suku bangsa yang datang dari daerah Selatan Cina, seperti propinsi Kwantung, Fukien dan Kanton. Orang Cina yang berasal dari propinsi Kwantung adalah suku bangsa Teo-Chiu sedangkan orang Hakka tinggal di daerah pedalaman Swantow. Sedangkan orang Hokkien berasal dari propinsi Fukien dan orang Kwong-Fu berasal dari daerah Kanton. Mereka memiliki mata pencaharian yang beragam. Orang Hookkien yang pada umumnya berdagang, orang Teo-Chiu berprofesi sebagai petani sedangkan orang Hakka bergerak di lapangan industri kecil dan

⁴⁰ Sevenhoven, *op.cit*, hal 47

⁴¹ *Ibid.*,

pertambnagan. Sehingga tidak benar bahwa semua orang Cina di Indonesia pada dasarnya berprofesi sebagai pedagang.⁴²

Pemilahan dan penggolongan masyarakat Cina di Indonesia mulai terbentuk sejak pemerintah kolonial membedakan mereka ke dalam dua golongan yakni Cina Totok dan Cina Peranakan. Hal di lakukan oleh pemerintah kolonial untuk membedakan antara orang Cina Totok (*singkeh*⁴³) yang berasal dari daratan Cina dan orang Cina Peranakan yang lahir dari perkawinan campuran antara laki-laki Cina dan perempuan pribumi. Cina Peranakan kebanyakan berasal dari imigran Cina gelombang pertama yang pada umumnya laki-laki. Sedangkan *singkeh* merupakan imigran gelombang kedua, yakni didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk dipekerjakan sebagi buruh di perambangan dan perkebunan di Hindia Belanda .

Tionghoa Totok dapat dikenali dari bahasa ibu (bahasa pengantar) yang dipergunakan sehari-hari, yang umumnya masih menggunakan dialek dari daerah asalnya. Sedangkan orang Cina Peranakan menggunakan bahasa pengantar lokal dimana mereka tinggal. Perbedaan di antara Totok dan Peranakan pada akhirnya berkembang pula dalam penerapan adat dan tradisi mereka seperti dalam urusan peribadatan dan orientasi hidup.

Dalam hal penampilan fisik dan gaya hidup sehari-hari terlihat perbedaan yang nyata. Orang Totok lebih cenderung konservatif, baik dalam cara berpakaian maupun penampilan fisiknya. Laki-laki orang Cina Totok pada masa ini biasanya rambutnya dikuncir panjang yang diikat pita. Pakaian yang mereka kenakan adalah baju panjang dengan lengan lebar dan celana longgar. Sedangkan kaum perempuan Totok memakai pakaian *pekki* yang terdiri dari baju kurung panjang, celana longgar dan berselop

⁴² Puspa Vasanty, *Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia*, dalam Koentjaraningrat, *Mamusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1900, hal 353-354

⁴³ *Ibid.*,

bordur. Kaki perempuan orang Cina Totok biasanya kecil, sebab ada tradisi kaki perempuan sejak usia kanak-kanak dimasukan ke bambu. Sedangkan Cina Peranakan lebih modern dan terbuka, mereka senantiasa mengikuti trend mode yang berkembang.⁴⁴

Perbedaan antara Totok dan Peranakan ini pada periode selanjutnya mempengaruhi pula dalam orientasi pendidikan dan organisasi sosial mereka, apalagi sejak diperkenankan memasuki dunia pendidikan modern. Pendidikan barat yang mulai diperkenalkan oleh kolonial Belanda sejak era politik etis, mendapat sambutan yang berbeda di kalangan masyarakat Cina. Orang Peranakan lebih dapat menyerap masuk ke dalam sistem pendidikan barat ketimbang orang *Singkeh*.

Pada awal abad ke-20 di Palembang didirikan sekolah Cina Belanda atau *Hollandsch Chineshe School* (HCS) yang gedungnya berlokasi di kampung 7 Ulu.Lama pendidikannya 7 tahun, sedangkan kurikulumnya sama seperti Sekolah Rendah Eropa (*Europesche Lagere School*), dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.⁴⁵

⁴⁴ Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar*, Jakarta-Amsterdam: Teratai, 1984, hal 53.

⁴⁵ Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, diterbitkan atas kerjasama Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya dengan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia Cabang Palembang, 2003, 50.

BAB III

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PALEMBANG DARI PERMULAAN ABAD KE-20 SAMPAI AKHIR KOLONIAL

A. Kapitalisasi dan Industriliasasi di Palembang

Tahun-tahun permulaan abad ke-20 dalam perspektif ekonomi dan politik kolonial Hindia Belanda dipandang sebagai puncak dari terwujudnya *Pax Nerlandica*.¹ Pasifikasi terhadap daerah-daerah diluar Jawa telah berakhir dan bersamaan dengan hal itu perkembangan ekonomi dan perdagangan daerah jajahan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi *neo-merkantilisme* kolonial Belanda sebagai akibat kemenangan kaum liberal dinegeri Belanda pada akhir abad ke-19.²

Palembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial dianggap sebagai salah satu kawasan *wingewesten* (daerah-untung) diluar pulau Jawa. Sebab Palembang pada masa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara pesat, yang ditandai dengan terbukanya Palembang sebagai kawasan eksploitasi kolonial, yakni terbukanya daerah ini bagi perkebunan (tembakau, kopi dan karet) serta mulai dilakukannya eksplorasi dibidang pertambangan (minyak bumi dan batu bara).³

Sebelumnya Palembang bukanlah daerah tujuan investasi para pengusaha perkebunan (*planters*), sejauh ini minat dan prioritas mereka untuk menanamkan

¹ *Pax Nerlandica* adalah keadaan aman dan makmur untuk semua wilayah kerajaan Belanda dibawah naungan kekuasaan pemerintahan kerajaan Belanda. Untuk jelasnya baca Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, 37-38

² *Ibid.*,

³ Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal 67

modalnya disektor perkebunan hanya ditujukan di wilayah Sumatera Timur. Meskipun begitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perkebunan Palembang pada masa ini, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya di pulau Sumatera. Kondisi menarik kaum kapitalis Barat yang memandang kawasan ini sebagai daerah memiliki prospek ekonomi kedepan. Laju perkembangan ekonomi perkebunan semakin menarik perhatian kaum kapitalis Barat, apalagi sejak dilakukannya reorganisasi administratif pemerintahan pada tahun 1912-1913, yang mempermudah proses konsesi tanah *erpacht*.⁴ Pembukaan usaha perkebunan yang pada awalnya di buka didaerah dataran tinggi Pasemah pada tahun 1887 dengan jumlah 21 perkebunan, maka sejak adanya reorganisasi administrasi meningkat menjadi 51 perkebunan pada tahun 1916.⁵

Perusahaan-perusahaan swasta dengan usaha dan permodalan yang besar mulai masuk ke Palembang, salah satu diantaranya adalah *Handelsvereeniging Amsterdam* (HVA) yang berkantor pusat di Amsterdam. HVA pada awalnya merupakan persekutuan para pengusaha dan bankir yang didirikan tahun 1870. Perusahaan ini membuka cabangnya di Palembang yakni didaerah Musi Ulu dan Tebing Tinggi. Disamping HVA ada beberapa perusahaan swasta Barat lainnya yang beroperasi di Palembang pada periode ini seperti perusahaan perkebunan swasta milik kaum pemodal dari Swiss (*Cultuur-maatschappij Indragiri* yang membuka lahan perkebunan kopi dari the seluas 2.500 bouw didaerah Pasemah. Selain Swiss para pemodal dari Jerman juga terlibat kegiatan usaha perkebunan di Palembang melalui perusahaan *Strait and Sunda Syndicate* , mereka membuka perkebunan karet seluas 7.000 bouw di Muara Dua.⁶

⁴ *Ibid.*, hal 69. Sistem *erpacht* adalah sistem sewa tanah dengan jangka waktu penggunaan selama 75 tahun. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah kolonial untuk melindungi tanah milik kaum pribumi dari serbuan pemodal asing yang ingin menanamkan kapitalnya untuk membuka usaha perkebunan.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

Akselarasi perluasan ekonomi kaum kapitalis Barat juga merambah disektor pertambangan Eksplorasi di bidang pertambangan termasuk didalamnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya yang telah diusahakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 ikut memberikan andil pula bagi pergerakan ekonomi Palembang. Penemuan bijih timah di pulau Bangka Belitung pada akhir abad ke-18, yang kemudian dikelola secara profesional oleh *Billiton Maatschapij* pada tahun 1860. Selanjutnya diikuti pula dengan penemuan tambang batu bara di Tanjung Enim (Bukit Asam) pada tahun 1891 serta ditemukannya sumber-sumber minyak bumi di berbagai tempat, seperti di Muara Enim (1899), Suban Jeriji (1906), Limau (1915), Karang Ringin (1902), Babat I (1904), banjarsari (1903), Arahan (1907), Ramok (1915), Tanjung Luntar (1915), Ladang Pait (1905) dan Sumpal (1912) yang kesemuanya diusahakan oleh *Bataafsche Petroleum Maatschappij*.⁷ Selain BPM beberapa perusahaan eksplorasi asing lainnya seperti *Standar Oil Co*, perusahaan tambang minyak bumi milik Amerika Serikat yang sempat berhenti beroperasi pada tahun 1890-an, kemudian setelah mendapatkan subsidi dari *Nederlandsche Kolonial Petroleum Maatschappij* (NKPM) beroperasi kembali tahun 1921 di sungai Gerong.⁸

Posisi Palembang sebagai penghasil minyak bumi merupakan daerah utama yang memberi pemasukan keuangan terbesar disektor ini bagi pemerintah kolonial. Produksi minyak bumi yang dihasilkan Palembang menempati posisi teratas untuk keseluruhan pulau Sumatera, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁷ Makmun Abdullah dkk, "*Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*", Jakarta: Depdikbud., Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985, hal 43. Mengenai eksplorasi tambang minyak bumi di Palembang didasarakn atas besluit dari Gouverneur-General van NI tanggal 13 Mei 1868 (*Ind.Staatsblad no.58*) dalam *De Petroleum-Bronnen van Palembang* koleksi Bat.Genootschap No.XV, 82, hal 15

⁸ Mestika Z, *op.cit*, hal 71

Tabel. 1. Produksi Minyak Bumi Sumatera 1924

No.	Daerah Penghasil Minyak Bumi	Jumlah Produksi (ton)
1.	Palembang	402.726
2.	Sumatera Timur	82.528
3.	Aceh	86.924
4.	Jambi	5.773
Total		577.951

Sumber: Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 123.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Palembang pada tahun 1924 dengan produksi 402.726 merupakan penghasil 80% dari keseluruhan produksi minyak bumi yang berasal dari pulau Sumatera.

Batu bara yang ditemukan di Tanjung Enim (Bukit Asam) pada tahun 1891 diatas, mulai dikelola secara profesional oleh pihak swasta, yakni *Lematang Maatschappij* pada tahun 1915. Kemudian usaha kelompok ini diambil alih oleh pemerintah kolonial pada tahun 1919, ketika produksinya menyamai kapasitas tambang batu bara di Ombilin Sumatera Barat.⁹ Produksi batubara Palembang setiap tahun meningkat sejak tambang ini mulai dieksplorasi seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Produksi Batu Bara Palembang 1917-1930

Tahun	Volume (Ton)
1917	9.700
1918	141.600
1922	113.481
1925	245.000
1926	284.000
1927	308.000
1928	308.000
1929	400.000
1930	500.000

Sumber: Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 72.

⁹ *Ibid.*,72

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa produksi batu bara terus mengalami peningkatan dari 9.700/ton pada tahun 1917 sampai periode mendekati krisis *malaise* menjadi 500.000/ton. Berdasarkan tabel di atas pula, ada tahun-tahun dimana produksi batu bara Palembang cenderung stabil artinya tidak mengalami penambahan atau pengurangan yakni selama dua tahun (tahun 1926 dan 1927).

Perkembangan ekonomi Palembang yang pesat didukung pula dengan pendirian lembaga perbankan yang tujuannya untuk mendukung lalu lintas pergerakan ekonomi keuangan di daerah ini. Maka pada periode ini Palembang telah memiliki lembaga keuangan yang cukup representatif seperti *Nederlandsche Handels Maatschappij* dan *De Javansche Bank*.¹⁰ Pertumbuhan ekonomi Palembang yang pesat, berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk sebagai konsekuensi logis hukum ekonomi, sebagaimana pepatah “*ada gula ada semut.*”

Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1915 jumlah penduduk Palembang diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri dari 800 orang Eropa, 7000 orang Cina, 2.200 orang Arab dan 200 orang Keling dan sisanya pribumi.¹¹ Pada tahun 1930 jumlah penduduk Palembang mengalami perubahan dua kali lipat selama 15, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Penduduk Berdasarkan Etnik di Palembang Tahun 1930

No.	Lokasi	Etnik				Total
		Eropa	Pribumi	Cina	Lainnya	
1.	Benedenlanden (Iilir)	2.557	528.705	18.922	4.285	544.469
2.	Bovenlanden (Ulu)	1.117	25.773	5.523	331	332.744
3.	Ogan dan Komering	153	207.489	1.621	79	209.342
Total		3.287	1.061.967	26.066	4.695	1.096.565

Sumber: Indisch Verslag, 1931: 13, dalam Mestika Z, *The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial Period*, editor Thomas J. Lindblad, *Historica foundation of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland,

¹⁰ Makmun Abdullah, *op.cit*, hal 93.

¹¹ *Ibid.*, hal 90

Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167, 1996, hal. 250

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan penduduk Palembang dari 650.000 jiwa pada tahun 1915 menjadi 1.096.565 jiwa, yang berarti penduduk Palembang meningkat dua kali lipat selama 15 tahun. Berdasarkan tabel diatas pula daerah yang jumlahnya penduduk terbesar adalah daerah Ilir yakni 544.469 orang, jumlah penduduk yang tinggal dikawasan ini dua kali lipat dari penduduk yang tinggal di Ogan dan Komering yang berjumlah 209.342 orang

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Palembang sebagai akibat semakin intensifnya perusahaan swasta kolonial yang terlibat dalam kepentingan pemerintah di daerah ini. Hal ini berimplikasi pada perubahan wajah kota Palembang. Kemajuan sebuah kota sebagaimana kota Palembang tidak terlepas dari indikator bagi ukuran kemajuan sebuah kota seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti; pasar, jalan dan transportasi. Palembang sebagaimana kota yang mengalami era kemajuan ekonomi, maka periode tahun 1920-an kita menemukan kota Palembang yang berkembang pesat yang dicirikan dengan meluasnya pembangunan kota dengan indikator diatas.

Pasar di Palembang mengalami pertumbuhan yang pesat, wilayah operasional pasar tidak hanya terbatas di ibukota saja, bahkan sampai menjangkau ke daerah pedalaman. Menurut catatan jumlah pasar di Palembang sampai tahun 1921 ada 74 buah yang tersebar di Surulangun, Muara Klingi, Muara Bliti, Muara Enim, Kedaton, Sekayu dan Baturaja.¹² Kemudian ditinjau dari segi lokasi pasar sebagai tempat jual beli

¹² Mestika Z, *op.cit*, hal 94.

barang, ada dua kategori pasar di Palembang yakni; pasar yang ada didaerah pedalaman (*Ulu*) dan pasar yang disekitar sungai atau pantai.

Pasar yang ada di daerah pedalaman yang umumnya letaknya jauh dari sungai Batanghari, lazimnya berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pertanian yang selanjutnya ditukar dengan komoditas lain. Barang-barang yang dihasilkan dari kawasan pedalaman selain hasil pertanian adalah hasil hutan/kebun, hewan ternak, unggas, ikan sungai, beras, kapuk, gambir, buah-buahan, sayur-mayur dan lain-lain. Pasar seperti ini hanya terdapat pada jalur jalan raya yang menghubungkan dusun yang satu dengan dusun yang lain yang disebut "*kalangan*"¹³

Pasar-pasar yang terdapat di kota Palembang pada umumnya merupakan bangunan permanen dan beratap. Pada tahun 1932 di kota Palembang terdapat dua buah pasar besar, yakni pasar 16 Ilir dan pasar Sekanak yang berlokasi di kampung 28 Ilir. Selain itu di kota ini ditemukan pula pasar-pasar yang relatif lebih kecil dari pada dua pasar tersebut. Pasar-pasar kecil itu antara lain; Pasar 10 Ilir (Pasar Kuto), Pasar 10 Ulu dan Pasar Kertapati.¹⁴ Bangunan pasar yang berdiri ditepi sungai atau di muara sungai menyebabkan lalu lintas perahu-dagang diperairan sungai Musi mengalami peningkatan.. Bahkan diantara pasar-pasar tersebut seperti Pasar Ilir 16 memiliki los-los yang bertingkat dua. Pasar Ilir 16 tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli semata, tetapi juga berfungsi sebagai tempat penampungan barang-barang yang berasal dari daerah *Ulu* dan barang-barang impor dari luar negeri.

¹³ *Kalangan* merupakan tempat jual beli barang, yang biasanya terdapat didaerah-daerah yang letaknya jauh dari anak sungai yang dapat dilayari oleh perahu, dimana hubungan satu-satunya melalui jalan setapak yang biasa dilakukan penduduk disekitarnya. Penentuan lokasi pasar "*kalangan*" didasarakan atas permufakatan, yang umumnya tempat bergiliran.

¹⁴ D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Leiden: Derde Deel, 's-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1917, hal 1190.

Sehingga fungsi pasar tersebut tidak hanya merupakan tempat pertemuan para pedagang yang memanfaatkan jalur sungai, baik pedagang dari daerah pedalaman maupun pedagang kota. Akan tetapi juga mempertemukan para pedagang asing yang berperan sebagai pedagang perantara diantara penduduk pribumi secara tak langsung, dimana umumnya barang-barang tersebut kemudian diangkut dengan perahu *jakung* ke daerah hilir sungai Musi, bahkan sampai ke luar negeri seperti Singapura.¹⁵

Keberadaan pasar-pasar di Palembang dari tahun ke tahun mulai meningkat, maka penambahan pasar-pasar yang baru disesuaikan pula dengan perkembangan kota dan jumlah penduduknya. Menjelangnya runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Palembang muncul pasar-pasar baru lagi seperti Pasar Lingkis yang kini dikenal dengan pasar *Cindeh* yang terletak di Muara Lorong Kapten, Pasar Ladang Plaju yang terletak di muara Plaju, Pasar Lemahabang di 2 Ilir dan Pasar Kilometer Lima diperbatasan kota dengan daerah Mudal.¹⁶ Pasar-pasar tersebut biasanya hanya buka pada waktu siang hari, dipasar-pasar ini biasanya dijual kebutuhan sehari-hari penduduk.

B. Komersialisasi Pertanian

Ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan Swasta Barat di Palembang telah dimulai sejak dekade ke dua abad ke-20. Masuknya ekonomi kapitalis ke daerah pedalaman Palembang, bahkan telah berlangsung pada akhir abad ke-19. Daerah-daerah pedalaman seperti Pasemah, Semenda dan Ranau yang sebagian besar berada didataran tinggi di bagian barat daya Palembang, merupakan lokasi yang strategis untuk penanaman produk pertanian seperti kopi dan teh, selain karena iklim dan tanahnya yang sesuai untuk budidaya tanaman ini.

¹⁵ Makmun Abdullah, *op.cit*, hal 95.

¹⁶ *Ibid*,

Penduduk lokal diwilayah-wilayah tersebut bahkan telah mengenal dan membudi dayakan tanaman kopi secara tradisional. Mereka menyebut “*kopi bubuk*”, kopi ini termasuk jenis kopi *arabika*. Sedangkan dipihak pengusaha swasta perkebunan (*onderneming*) lebih menyukai jenis kopi robusta, jenis kopi ini biasaya dipanen selama tiga atau empat kali dalam musim tanam.¹⁷ Usaha kaum kapitalis untuk memproduksi massal kopi jenis robusta dilakukan dengan bantuan tehnologi pertanian modern, yakni melalui uji pemilihan bibit unggul pada tahun 1915 yang didatangkan langsung dari Balai Penelitian Pertanian Bogor. Para pengusaha swasta ini juga berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan jalan melakukan ekstensifikasi lahan perkebunan, tetapi usaha tidak telaksana karena terbentur masalah tenaga kerja. Karena penduduk lokal lebih memilih bekerja dilahan mereka masaing-masing dari pada bekerja di perkebunan milik kaum kapitalis Barat. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, maka pemerintah Belanda berusaha mendatangkan tenaga kerja dari luar, khususnya dari pulau Jawa, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesulitan untuk membawanya ke Palembang, mungkin terkait dengan biaya untuk mendatangkannya..

Komoditas lain selain kopi yang menjadi andalan ekonomi pemerintah kolonial dan para *planters* adalah karet. Biji-biji karet mulai di budidayakan secara ilmiah di Kebun Raya Bogor pada tahun 1876, kemudian baru pada tahun 1903 dimulai usaha memproduksi massal komoditas ini di Sumatera.¹⁸ Sebelumnya budidaya karet telah dikenal oleh rakyat Sumatera bagian Selatan sejak akhir 1890-an¹⁹ yang kemudian

¹⁷ Mestika Z, *op.cit*, hal 86.

¹⁸ P.S. Siswoputranto, *Perkembangan Karet Internasional*, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS), 1981, hal 50.

¹⁹ Bambang Purwanto, “Migrasi dan Kesempatan Kerja : Persoalan Tenaga Kerja Dalam Perkebunan Karet Rakyat di Sumatera Bagian Selatan Pada Akhir Masa Kolonial”, dalam kumpulan

meluas seiring dengan pembukaan *onderneming* di daerah dataran rendah, seperti disekitar Musi Ilir. Selain itu tanaman karet juga di budidayakan secara luas di *onderafdeling* Ogan Ulu, Ogan Ilir, Lematang Ilir, Komering Ulu, Rawas, Komering Ilir.²⁰

Pada periode ini pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan penanaman *karet rebung* atau karet batang dari jenis *ficus elastica* dan getah perca kepada masyarakat lokal. Sebelumnya penduduk di daerah Sumatera Selatan secara tradisional telah mengambil getah ficus atau getah perca dari pohon-pohon yang tumbuh secara liar di hutan. Perubahan orientasi penduduk lokal terhadap tanaman karet ini, disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang mendorong penduduk untuk menanam tanaman ini. Dasar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah setelah melihat terjadinya lonjakan kenaikan harga getah karet ini dipasaran dunia yang mencapai 180 per pikul pada tahun 1890 dan 1899, yang mencapai rata-rata 123 per hulden pada dekade pertama abad ke-20.²¹

Kecenderungan masyarakat lokal di daerah dataran tinggi di Sumatera Selatan yang lebih menyukai menanam karet, selain karena faktor tingginya harga dipasaran, juga tanaman secara alamiah tanamannya telah mereka kenal. Ketergantungan para petani karet rakyat terhadap komoditas ini semakin bertambah setelah pada saat yang sama komoditas andalan lainnya seperti kopi dan lada mengalami penurunan pada akhir abad ke-19.²² Eksploitasi para petani lokal terhadap karet alam yang berlebihan mengakibatkan penurunan jumlah karet alam, sehingga hal tersebut mengurangi pendapatan petani. Penurunan pendapatan petani juga diakibatkan oleh kebijakan

makalah Kongres Nasional Sejarah 1966, Sub Tema: *Dinamika Sosial Ekonomi III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hal 2.

²⁰ *Ibid*, hal 3

²¹ *Ibid*,

²² Bambang Purwanto, *op.cit*, hal 3.

kolonial yang melarang petani merambah hutan secara bebas untuk mengambil getah karet.

Secara garis besar pasang surut orientasi masyarakat lokal terhadap budidaya karet pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karena penduduk tidak menganggap sepenuhnya untuk menggantungkan mata pencaharian mereka pada tanaman karet jenis *ficus*. Kedua, karena penurunan harga produksi pertanian khususnya lada dan kopi tidak berlangsung lama dan flutuansi harga satu komoditas ke komoditas lain tidak selalu berlangsung bersamaan. Ketiga, karena masyarakat lokal tetap menganggap getah *picus* sebagai hasil hutan semata. Sedangkan yang keempat penduduk secara tradisional telah menanam jenis pohon karet lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta dibutuhkan oleh pasar dunia.

Kondisi karet lokal juga terkait dengan situasi pasar global, karet pada permulaan abad ke-20 ini juga dipandang sebagai salah satu primadona ekspor bagi pemerintah kolonial di wilayah Asia Tenggara sebagaimana negara penghasil karet utama dunia. Produksi karet Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda dipicu pula oleh kecenderungan harga karet global yang terus berflutuasi naik. Pada tahun 1910 produksi karet alam dunia berjumlah 95.000 ton, sementara Asia Tenggara menyumbangkan 11.000 ton. Sejak tahun 1914 produksi karet Asia Tenggara telah mendominasi produk karet dunia dan pada tahun 1915 dari 170.500 ton produk karet dunia, Asia Tenggara menghasilkan 116.500 ton.²³

Palembang merupakan salah satu daerah terpenting pengeekpor karet alam bagi pemerintah Hindia Belanda pada dekade kedua abad ke-20 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah :

²³ P.S. Siswoputranto, op.cit, hal 35.

Tabel 4. Ekspor Karet Rakyat dari Daerah Sentra Karet di Hindia Belanda
(dalam juta kg)

Daerah	T a h u n							
	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Jambi	9	11	15	15	19	20	23	20
Palembang	3	7	12	11	15	13	16	10
Afdeeling Borneo Selatan dan Timur	8	12	17	15	18	17	21	18
Afdeeling Borneo Barat	7	10	16	16	18	17	20	15
Pantai Timur Sumatra	5	10	11	9	11	13	14	11
Total	32	50	71	66	81	80	94	78

Sumber: J.W.J. Wellan, *Zuid-Sumatra, Economisch Overzicht van de Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Districten en Benkolen* (Wageningen: H. Veenman 7 Zoon), 1932, hal 266.

Berdasarkan tabel diatas ekspor karet Palembang ke luar negeri berkisar dalam angka puluhan juta kg. Dengan dimaksudkan Palembang kedalam daerah utama pengekspor karet, menunjukkan bahwa wilayah mendapat perhatian dari pemerintah kolonial.

Masuknya perusahaan perkebunan swasta di Palembang sama sekali tidak mematikan karet rakyat, bahkan adanya perusahaan tersebut justru menguntungkan. Sebab kelebihan hasil produksi petani dibeli oleh pihak perusahaan. Bahkan pemerintah kolonial Belanda juga berusaha mengangkat produk pertanian rakyat didaerah ini. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah pertanian yang lulusannya ditujukan untuk menangani masalah penyakit tanaman. Sekolah-sekolah ini di dirikan didaerah Muara Enim dan Pagar Alam.²⁴

Kopi dan karet merupakan komoditas utama baik bagi kapitalis barat , pemerintah kolonial di Palembang maupun bagi pribumi sendiri. Pada dekade kedua permulaan abad ke-20 perbandingan jumlah produksi kopi dan karet antara perusahaan

²⁴ Mestika Z, op.cit, hal 89.

swasta dan pribumi cenderung saling berkompetisi dalam hal produksinya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.5 Distribusi Produksi Kopi dan Karet antara Pribumi dan Swasta

No	Tahun	Pribumi		Swasta	
		Kopi (ton)	Karet (ton)	Kopi (ton)	Karet (ton)
1.	1923	12.026	3.200	8.716	-
2.	1924	19.881	6.506	16.903	-
3.	1925	20.981	11.951	19.466	242
4.	1926	25.364	11.488	32.591	313
5.	1927	23.407	15.082	18.188	498
6.	1928	28.229	12.509	16.405	668
7.	1929	17.818	15.687	14.534	718

Sumber: *Tjidschrift Vereeniging van Landbouwconsumenten in Nederlandsch-Indie* 8, 1931,820, dalam Mestika Z, *The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial Period*, editor Thomas J. Lindblad, *Historica foundation of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167, 1996, hal. 254.

Dari tabel diatas terlihat bahwa nuansa persaingan antara pihak swasta dan petani lokal di dalam mengelola produk andalan ini. Persaingan antara swasta dengan penduduk lokal terlihat terutama pada komoditas kopi. Sedangkan karet pihak kapisatas produksi jauh dari yang dihasilkan oleh penduduk lokal. Berdasarkan angka statistik diatas meskipun karet yang diusahakan oleh pihak swasta memiliki jumlah yang jauh lebih kecil dari karet rakyat. Akan tetapi karet swasta dari sisi kuantitas mengalami peningkatan dari 242 ton pada tahun 1924 menjadi 718 pada tahun 1929 atau naik dua kali lebih. Hal ini menunjukkan minat swasta untuk menanamkan disektor ini cukup tinggi.

Komersialisasi dua komoditisa utama ini di Palembang pada gilirannya merubah standar hidup masyarakat lokal. Sebagai catatan sebelum adanya kebijakan pemerintah

untuk mendorong petani melakukan penanaman massal pohon karet. Karet rakyat bukanlah tanaman yang diurus penduduk, baru setelah *rubberboom* atau masa kenaikan harga pasaran karet dunia pada tahun 1915 dan 1919, memberikan dampak yang luar biasa, saat itu harga karet mentah membubung tinggi yakni f.120-130 per pikul.²⁵ Akibatnya penduduk Palembang yang terutama yang tinggal didaerah dataran rendah melakukan penanaman dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga tanah *renah* disekitar penduduk menjadi lahan karet. Sehingga pada tahun 1920 karet telah menjadi tanaman massal di Palembang.

Pada periode berikutnya ketika harga karet mengalami penurunan sebagai akibat pasar mulai jenuh karena komoditas karet yang ada dipasaran dunia telah melebihi batas maksimal dari permintaan konsumen. Sebagai akibatnya pasar karet di London menerapkan kebijakan *Stevenson-Restriction Scheme, Stevenson-Restriction Scheme*, yakni penetapan kuota bagi negara-negara penghasil karet termasuk Hindia Belanda (sebagai penghasil karet ke tiga terbesar didunia).²⁶ Bahkan pemerintah Hindia Belanda termasuk mengikuti aturan IRRA (International Rubber Regulation Agreement), sebagai penyempurnaan dari rencana Stvensen yang telah dibubarkan oleh parlemen Inggris. Pada tahun 1928. perjanjian IRRA merupakan pengaturan produksi ekspor dari produsen karet seperti Malaya, India, serawak, kalimantan Utara, Hindia Belanda, Thailand dan Indo Cina. Namun pengaruh IRRA tidak pernah mampu mengendalikan harga karet rakyat. Ini menunjukkan bahwa perdagangan karet telah memasuki pasar terbuka.²⁷

²⁵ Ibid., hal 91

²⁶ Ibid., hal 93.

²⁷ N.K. Pekelharing, *Devolkingsrubbercultuur in Nederlandsh Indie*, dalam Budiharjo, *Pekembangan Ekonomi Masyarakat Jambi, Studi masa Kolonial*, Yogyakarta:Medprint Offset, 2001, hal 81.

Penurunan harga karet di dunia juga dirasakan oleh petani karet di Palembang pada masa ini. Meskipun begitu berkat keuntungan yang diperoleh oleh kenaikan harga kopi serta karet yang meningkat untuk beberapa periode sebelumnya terjadinya *malaise* pada akhir tahun dua puluhan telah membawa pengaruh yang luar biasa bagi penduduk Palembang, tak terkecuali mereka yang ada didaerah pedalaman tempat penghasil komoditas ini. Tahun-tahun kemakmuran sebagai akibat dari kenaikan komoditas tersebut membuat penduduk lokal masih memiliki harta berlebih, orang Palembang pada masa ini menganggap berkah kemakmuran dengan sebutan sebagai masa *ojan emas*. Bentuk kemakmuran tersebut diperlihatkan, salah satunya dari fakta dari banyaknya orang Palembang yang pergi naik haji tahun 1926. Sebelum karet diproduksi massal orang dan harganya naik, orang Palembang yang menunaikan ibadah haji pada permulaan abad ke-20, tepatnya tahun 1906 berjumlah 393 orang, jumlah ini meningkat 5 kali lipat menjelang krisis *malaise* (1930), yakni 2.180 orang.²⁸

C. Malaise di Palembang

Malaise atau orang sering menyebutnya zaman meleset merupakan masa-masa sulit kondisi ekonomi dunia. Di negara-negara barat mengakibatkan berjuta-juta orang kehilangan pekerjaan. Hal ini dirasakan oleh Hindia Belanda yang menggantungkan perekonomian mereka pada ekspor bahan mentah.²⁹

Dari tahun 1929 sampai tahun 1930 rata-rata harga barang ekspor dari tanah Hindia Belanda turun 28%, tahun berikutnya melorot menjadi 255 %, kemudian jatuh lagi menjadi 21% dan akhirnya meluncur 17% pada tahun 1933. Selama lima tahun pertama 1930-an, pendapatan rata-rata dari ekspor hanya sebesar 37%-nya dari

²⁸ *Ibid.*, hal 112-114

²⁹ William Joseph O'Malley, *Indonesia di Masa Malaise : Suatu Studi terhadap Sumatea Timur dan Yogyakarta di tahun 1930-an*, dimuat dalam Prisma Edisi Agustus No.8, Jakarta: LP3ES, 1983,35

penadaptasi rata-rata pada tahun 1920-an. Angka pada tahun 1935 kurang dari seperempat angka yang dicapai pada tahun sepuluh tahun sebelumnya.³⁰

Akibat malaise memang dirasakan oleh perekonomian ekspor secara keseluruhan, namun untuk berbagai bagian kondisinya berbeda-beda baik sifat maupun kepahitan yang diderita. Untuk berbagai jenis komoditas ekspor, malaise berarti gangguan kecil dan sekedar kemunduran yang mengandung harapan ke arah masa depan yang lebih cerah. Bagi jenis komoditas ekspor lainnya malaise berarti kemerosotan yang menyakitnya namun mengandung kemungkinan untuk pulih kembali. Sedangkan untuk beberapa jenis jenis komoditas tertentu malaise berarti jalan buntu sama sekali.

Industri minyak bumi untuk ekspor hanya sedikit terhambat oleh malaise. Industri yang padat modal dalam proses eksploitasinya ini, baik dalam penemuan sumber, pengeboran, penyulingan dan pengapalannya, kesemuanya dikuasai oleh modal raksasa asing dan oleh pemerintah. Tatkala malaise memukul harga-harga pasar secara drastis, industri minyak bumi, dengan biaya-biaya tetapnya yang tak dapat dikurangi dan amat besar bila dibandingkan dengan biaya keseluruhan tetap beroperasi meski dengan untung yang diperoleh kecil.

Situasi karet amat berbeda, produksi karet dilakukan oleh usaha perkebunan besar yang dimiliki oleh pengusaha besar barat dan oleh rakyat yang berkebung secara kecil-kecilan. Pada usaha perkebunan besar, biaya *overhead* maupun ongkos produksinya menjadi naik. Sedang usaha perkebunan rakyat hampir-hampir tidak membutuhkan modal dan satu-satunya ongkos produksi ialah tenaga kerja mereka sendiri.

³⁰ *Ibid.*,

Tatkala pasaran karet dunia jatuh (*smoked sheet rubber*) setiap ½ kg berharga 54 sen turun menjadi 30 ½ sen pada tahun 1930, 15 sen pada tahun 1931, dan 8 ½ pada tahun 1932 dan pada saat pemulihan di tahun 1933 harganya tetap rendah yaitu sebesar 11% per ½ kg, para pengusaha karet Barat menuntut dilakukannya campur tangan pemerintah.³¹ Komoditas lain seperti kopi juga menghadapi persaingan sebagaimana karet, bahkan sebelum datangnya malaise harga kopi juga terus-menerus turun. Untuk membantu stabilitas harga kopi pemerintah Hindia Belanda menetapkan pajak impor kopi.

Untuk kasus Palembang, depresi ekonomi pada tahun 1930-an pada awalnya berdampak buruk terhadap kelangsungan ekonomi petani karet rakyat, begitu pula sebaliknya keadaan ini juga dialami para pengusaha swasta Barat di Palembang. Bahkan dengan berbagai upaya pihak swasta berusaha mengatasi keadaan ini, salah satunya usaha yang dicoba oleh kelompok bisnis ZUSUMA (*Zuid-Sumatra Landbouw-en Nijverheidsvereniging*).³²

Organisasi ini merupakan kumpulan para pengusaha swasta Eropa dengan 75 orang yang bertujuan mencari cara untuk mengembalikan kestabilan harga komoditas karet seperti semula. Organisasi lebih banyak mencurahkan perhatian berkaitan dengan persoalan pengadaan dan perekrutan tenaga kerja, karena pada masa *malaise* banyak para buruh pekerja di perkebunan yang lari dari ikatan kontrak dan lebih memilih sebagai buruh lepas dengan alasan lebih menguntungkan dari segi penghasilannya.

Keadaan *malaise* secara nyata memukul usaha swasta barat yang bergerak di sektor ini. Beberapa usaha swasta seperti *Rubber Uni*, *Borsumij* dan sejumlah perusahaan baratnya mulai seletif dalam membeli karet rakyat, bahkan salah satu

³¹ *Ibid.*, hal 36

³² Mestika Z, *op.cit*, hal 115.

perusahaan Swasta Perancis, yakni *Syndicate des Caf  s du Havre*, tidak mau lagi membeli kopi yang tidak berkualitas. Kondisi perusahaan swasta di barat di Palembang bertambah sulit, dengan masuknya perusahaan – perusahaan Jepang pada tahun 1920-an yang melakukan strategi *dumping*.³³ Bahkan perusahaan-perusahaan Jepang berusaha menarik simpati konsumen di daerah Palembang dengan cara berpromosi lewat surat kabar seperti *Nieuwsblad voor de Residentie Palembang*, *Han Po* dan *Pertja Selata*. Sehingga pada tahun 1930-an daerah pedalaman di wilayah Palembang tak luput dari serbuan barang-barang produksi Jepang dari barang-barang rumah tangga sampai peralatan perkantoran.³⁴

Di sektor pertanian karet rakyat keadaan jauh lebih baik, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatasi kendala akibat krisis ekonomi ini dengan menerapkan *Rubberrestrictie*, yang dikeluarkan pada tahun 1934. Masyarakat luar Jawa termasuk penduduk Palembang sering menyebutnya dengan “*kupon karet*” (*rubber coupon*).³⁵ Penerapan kupon karet dilakukan secara berkala yakni setiap 3 bulan sekali dengan mengacu pada *The International Regulation Commitee*.

Pelaksanaan kupon karet di lapangan dilakukan dengan cara membagikan kupon karet kepada rakyat sesuai dengan luas dan pohon karet yang dimiliki. Penduduk Palembang menyambut kebijakan dengan senang karena kupon memiliki nilai komersial, yakni kupon bisa ditukar dengan uang. Untuk mengontrol dan mengendalikan harga dipasaran, penjatahan kupon kepada petani karet disesuaikan

³³ *Dumping* adalah strategi melakukan penjualan harga barang dengan harga murah dengan maksud mengalahkan perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Istilah ini menjadi istilah umum yang bisa dikaitkan dengan strategi dagang negara Jepang.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, hal 116.

dengan situasi dan kestabilan harga karet dipasaran dunia, sehingga cenderung bersifat fluktuatif.

Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial cukup efektif untuk mendongkrak kembali kondisi perekonomian Palembang. Dan sebagai bukti banyak bank dan perusahaan swasta kembali membuka cabang di daerah ini. Hal ini juga mengindikasikan sektor karet rakyat setelah dua tahun kebijakan pemerintah dengan penerapan kupon karet berangsur-angsur para petani karet kembali mengurus kebun-kebun karet mereka.

Keadaan karet rakyat menunjukkan fenomena yang berbeda dengan daerah lain di Hindia Belanda ketika kawasan mengalami kesulitan akibat krisis ini justru karet rakyat Palembang bisa keluar dari krisis. Bahkan untuk menunjukkan betapa krisis ekonomi dunia tidak mempengaruhi mereka, banyak para petani karet yang membeli barang-barang kebutuhan konsumtif dari pulau Jawa. Karet rakyat Palembang pada tahun 1940 mencatat prestasi dibandingkan daerah lainnya pada tahun akhir masa kolonial ini luas lahan perkebunan karet di Palembang mencapai 188.938 hektare bahkan lebih besar dari daerah Sumatera Timur yang selama ini menjadi salah satu penghasil karet utama di pulau Sumatera, yakni hanya 43.970 hektare.

Anomali dari peristiwa ekonomi ini, seolah menyangkal preposisi tesis Boeke *ekonomi dualistik*³⁶, yang menyatakan secara umum menyatakan kondisi ekonomi Hindia Belanda terbelah menjadi dua yakni sektor modern yang dikuasai sepenuhnya masyarakat Barat (kaum kapital) dan ekonomi tradisional pribumi yang bertumpu pada pertanian subsistensi. Bahkan lebih jauh lagi kondisi di Palembang seolah merupakan

³⁶ Ongkoham, *Merosotnya Peranan Pribumi dan Perdagangan Komoditi*, dalam Prisma Edisi Agustus No. 8, Jakarta, LP3ES, 1983, hal 18.

suatu bukti bahwa tidak selamanya prinsip ekonomi dualistik Boeke tidak bisa saling bekerja sama

Faktanya di Palembang ekonomi rakyat yang bertumpu pada karet mampu bersaing, bahkan kembali pulih dari kemerosotan akibat depresi ekonomi ketimbang karet perkebunan milik kaum kapitalis barat. Tesis Boeke cocok untuk menggambarkan ekonomi kolonial di pulau Jawa yang masyarakat lebih bersifat feodalistik. Sedangkan masyarakat luar Jawa seperti Palembang yang lebih bersifat terbuka dan demokratis dalam menerima ide-ide baru mampu mengambil manfaat dari situasi.

BAB IV

JARINGAN PERDAGANGAN PERANTARA CINA DI PALEMBANG DARI PERMULAAN ABAD KE-20 SAMPAI AKHIR KOLONIAL

A. Jaringan Perdagangan Perantara Cina di Palembang

J.S. Furnival menggambarkan masyarakat Indonesia pada zaman kolonial sebagai suatu masyarakat majemuk dengan sektor ekonomi modern tumbuh bersama-sama sektor tradisional (perekonomian pertanian). Sektor perekonomian modern berada di tangan orang Eropa (terutama Belanda), sedangkan ekonomi pertanian di tangan pribumi. Orang Cina bertindak sebagai sebagai “perantara” antara orang Eropa dan penduduk pribumi.¹

Peranan orang Cina sebagai pedagang perantara di Palembang sebenarnya telah dijalankan oleh kelompok etnik ini jauh sebelum kedatangan bangsa barat. Bahkan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, orang-orang Cina telah datang dan menjalankan aktifitas perdagangan di kerajaan ini. Bahkan pada masa ketika Palembang mengalami kekacauan sebagai akibat serangan pasukan Majapahit. Palembang dibawah pimpinan perantau Cina Liang Tau-ming berhasil mengatasi keadaan kacau tersebut sehingga mengembalikan aktifitas perdagangan di wilayah ini.²

Pada masa Kesultanan Palembang orang-orang Cina bersama dengan orang Arab memainkan peran utama sebagai pedagang perantara yang mewakili kepentingan pihak Kesultanan Palembang untuk mendapatkan barang-barang dari luar. Meskipun pada masa Kesultanan posisi mereka tidak sekuat orang Arab, mungkin hal ini semata

¹ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Graffiti Press, 1995, hal 133-134.

² Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, diterbitkan atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Palembang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 89-90.

karena kedekatan secara kultural-faktor agama - yang sama antara Sultan dengan orang Arab.³

Bahkan dalam satu catatan Sevehoven untuk menunjukkan bahwa orang-orang Cina tertentu memperoleh kedudukan istimewa dari pihak kesultanan sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam profesi ini, orang Cina oleh Sultan Palembang ada yang di beri gelar *Demang*, tentu saja pemberian gelar ini diberikan setelah orang Cina tersebut mau masuk Islam. Sevenhoven menambahkan pula setelah mereka (orang Cina) masuk Islam, untuk memperkuat ikatan kekerabatan maka Sultan mengawinkannya dengan anak atau saudara perempuan Sultan..⁴

Pada masa kolonial posisi orang Cina sebagai pedagang perantara semakin menunjukkan bentuknya. Berdasarkan *regering almanak* tahun 1854, penduduk Hindia Belanda di bagi ke dalam tiga strata; orang Eropa dilapis atas, orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) termasuk Cina dan Arab dilapis kedua dan yang terbawah pribumi (*Inlander*). Kebijakan pemerintah kolonial untuk menjadikan etnik ini hanya berkecukupan dalam urusan perdagangan semata, semakin jelas sejak adanya larangan pemerintah bagi orang-orang Cina keluar secara bebas dari pemukiman mereka (*wijkenstelsel*) dan melarang orang-orang Cina berusaha di lapangan pertanian.⁵

Palembang dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 memiliki arti strategis. Posisi strategis Palembang pada periode ini

³ Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, diterjemahkan oleh Sugarda Purbakawatja, Jakarta: Bhatara, 1971, hal 34

⁴ *Ibid.*, hal

⁵ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, 38.

adalah ditemukannya sumber-sumber daya ekonomi baru berupa komoditas pertanian (kopi dan karet).⁶

Permulaan awal abad ke-20 dipandang pula sebagai periode proses kapitalisasi Barat merambah ke wilayah ini. Maka pada masa ini perusahaan Barat mulai mengembangkan cabangnya di Palembang. Sehingga pada masa ini tercatat beberapa pedagang-pengusaha besar Eropa beroperasi di Palembang seperti *Borsumij* (eksportir karet), *Escompto* (importir barang-barang mewah), *Jacobson v.d Berg* (Tekstil), NHM (perbankan) dan *Hagemijer* (makanan dan minuman).⁷

Posisi orang-orang Cina di Palembang pada periode ini lebih banyak menguasai bisnis transportasi, seperti transportasi air (perkapalan). Maka dalam bidang ini tercatat kelompok usaha yang dimiliki orang-orang Cina di Palembang, antara lain, yaitu; bidang transportasi dengan nama *Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi*, yang melayani rute domestik maupun manca negara. Sektor perkebunan seperti karet juga menjadi lahan bisnis kelompok ini. Tidak sedikit kelompok usaha dibidang ini yang dimiliki orang Cina, seperti *NV Palembang Rubber* dan *NV Hong Tok*.⁸

Pertumbuhan dan perkembangan kelompok pengusaha swasta Eropa di Hindia pada umumnya berperan sebagai mitra pemerintah. Sehingga tidak disangsikan lagi kemajuan dan kemunduran mereka tergantung dari uluran dan konsensi yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Kelompok ini menjadi kelompok penting untuk mendukung kebijakan dari proyek-proyek pemerintah.

Berbeda dengan kelompok bisnis Eropa yang lebih banyak menggantungkan sepenuhnya pada kemurahan hati dan kebijakan pemerintah kolonial. Pengusaha dan

⁶ Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal 5.

⁷ Mestika Zed, *op.cit*, hal 63-121.

⁸ *Ibid.*,

pedagang Cina cenderung bertindak sebagai agen yang tidak terkait langsung dengan perusahaan Barat. Dan pada umumnya mereka mengandalkan pada intuitif dan pengalaman dagang mereka yang diwariskan oleh leluhur mereka secara turun-temurun.

Mestika Z menggambarkan kemampuan kelompok ini sebagai kaum *middleman* di Palembang seperti model anyaman benang dimana antara satu dengan yang lainnya saling kait mengakit. Hampir sebagian besar orang Cina di Palembang terkait dengan kegiatan perdagangan mulai dari pengecer di kedai-kedai, pedagang kecil, agen penyalur hasil perkebunan seperti kopi dan karet sampai kepada barang-barang yang berasal dari luar daerah ini.

Masyarakat Cina di Palembang sebagaimana umumnya masyarakat Cina di Hindia Belanda bukanlah masyarakat yang homogen. Secara internal ada pembagian yang lazim antara "totok" dan peranakan. Kelompok totok berasal dari Cina daratan sedangkan peranakan merupakan hasil perkawinan percampuran dengan penduduk pribumi.

NV *Palembang Rubber* dan NV *Hok Tong* yang disebutkan diatas adalah satu perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kelompok Cina peranakan. Kelompok usaha ini sebelumnya bergerak dalam operasional pabrik gula di pulau Jawa yang kemudian melebarkan sayap bisnisnya ke pengembangan bisnis karet di Palembang. Sementara kelompok usaha *Hong Tong* memiliki basis bisnis karet di Palembang dengan kendali bisnisnya di Singapura. Kelompok usaha lainnya yang dimiliki orang Cina peranakan adalah NV *Nieuwe Ijsfabriek* yang mengelola es balok.

Dalam pengelolaan distribusi karet sebagaimana pendapat Alexander Irwan, Alexander Irwan, dalam artikelnya *Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional*, menguraikan rantai jaringan bisnis karet orang Cina tidak hanya melibatkan peran

pedagang-pengusaha Cina dalam lingkup lokal (Sumatera Selatan), akan tetapi juga sampai ke lingkup nasional dan regional.⁹

Jaringan bisnis perkebunan karet di Palembang semula dikuasai oleh orang Melayu. Pada tahun 1920-an ketika permintaan karet berkembang secara pesat, kendali bisnis diambil oleh orang-orang Cina. Bahkan pada periode selanjutnya tahun 1930-an sebagian bisnis perkebunan karet dikuasai oleh etnik ini. Jaringan regional bisnis karet di Palembang yang dikuasai oleh orang Cina juga melibatkan pedagang-pengusaha dari negara tetangga, seperti Singapura, Bombay (India), Karachi (Pakistan), Shanghai serta Hongkong.¹⁰

Pedagang-pedagang besar (eksportir) Cina di Palembang memiliki jaringan perdagangan karet yang luas. Hampir sebagian besar jaringan perdagangan karet mereka kuasai dari skala mikro-petani tengkulak- sampai perdagangan besar. Dalam kelompok lapis pertama jaringan perdagangan perantara adalah para *tengkulak*. Mereka biasanya bertindak sebagai agen penyalur (pedagang perantara) yang umumnya turun langsung sampai ke wilayah administratif setingkat dusun dan mendapatkan imbalan atas tugasnya berupa komisi. Sehingga kelompok orang-orang yang menjalan profesi sering disebut *kommisioner*.¹¹

Para *kommisioner* menyerahkan hasil komoditas tertentu kepada pedagang perantara yang lebih besar, yang selanjutnya dibawa ke pangkalan yakni daerah tempat bongkar muat kapal-kapal yang merapat di pinggir sungai yang selanjutnya diekspor keluar negeri.¹² Di daerah pedalaman Palembang orang Cina juga memiliki peranan

⁹Alexander Irwan, "Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional", dalam (I. Wibowo,ed), *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Pusat Studi Cina, 1999, 75-97

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, hal 99

¹² Mestika Z, *op.cit*, hal 99,

yang cukup penting. Komoditas kopi yang dihasilkan dari daerah seperti Pagar alam, Muara Enim, Lahat, Martapura dan sebagainya kebanyakan di jual kepada tengkulak Cina yang beroperasi di pasar mereka¹³

Posisi orang Cina jauh lebih baik dibandingkan kelompok Timur Asing lainnya seperti Arab, setidaknya melihat realitas sejarah dimana pada masa akhir Kesultanan Palembang. Kelompok Arab pada masa ini merupakan kelompok usaha yang relatif lebih kuat dibanding pedagang-pengusaha Cina, mereka menguasai sektor tekstil (kain) dan pemilikan kapal.

Pada permulaan abad XX posisinya berubah, perubahan ini mungkin terjadi sebagai akibat perubahan politik dan ekonomi dari penguasa baru (Hindia Belanda) yang diskriminatif terhadap mereka, dimana sejak akhir abad 19 pedagang-pedagang Arab di larang memasuki daerah pedalaman. Hanya komoditas perdagangan kopi yang masih menjadi lahan bisnis mereka disamping usaha tradisional mereka seperti minyak wangi-wangian dan tekstil.¹⁴

Akan halnya sektor usaha pribumi pada permulaan abad XX, di Palembang muncul beberapa pengusaha pribumi yang memiliki reputasi dalam sektor perdagangan antara lain yaitu: Haji M. Akil dengan Firmanya Haji M. Akil dan Haji Anang dengan Firmanya Haji Anang. Haji M Aki! mendirikan perusahaan firmanya di kampung 4 Ulu pada tahun 1920. Ia memiliki cabang perusahaannya didaerah Baturaja yang dikelola oleh Haji Moh. Soleh dengan nama Firma Haji Moh. Soleh & Co dan Mas Agus Cek Ong Cek Bek. Perusahaannya berkompetisi secara ketat dengan pengusaha Cina yang bernama Lim Kim Han yang berlokasi di Muara Enim. Selain Haji. Akil, Haji Anang juga merupakan pengusaha pribumi yang cukup disegani. Kelompok usahanya juga

¹³ *Ibid*, hal 100

¹⁴ *Ibid.*,

menjadi rival utama bagi usaha sejenis dari milik orang Cina yang ergerak di percetakan dan ekspor-impor.¹⁵

Selain kedua tokoh diatas masih ada beberapa pribumi yang cukup menonjol baik secara perorangan maupun dalam bentuk firma. Pengusaha pribumi antara lain: Haji Asya'ri seorang pedagang sekaligus pemborong bangunan, Haji Ali pedagang karet di seberang 1 Ulu dan Haji Jamaludin dengan perusahaannya *Firma Toko Bali*. Para pengusaha pribumi bergabung ke dalam wadah persatuan pedagang-pengusaha pribumi dengan nama organisasi *NV Bumi Melayu*. Maksud dan tujuannya pendirian organisasi tentu saja untuk menghadapi persaingan dan kompetisi dengan asosiasi sejenis milik para pedagang non-pribumi seperti *Perkoempolan Dagang Islam Palembang* milik orang Arab dan *Giok Hiong Kong Hui* milik orang Cina.¹⁶

Sebagai kelompok usaha yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak terlepas dari kompetisi dan persaingan bisnis baik dengan pedagang-pengusaha Eropa maupun dengan mitra Timur Asingnya seperti Cina dan Arab. Para pedagang-pengusaha pribumi juga memiliki rantai perdagangan pula. Dikelompok jaringan perdagangan bumi lapis pertama (skala mikro) terutama didaerah pedalaman mereka mengandalkan peran *-pasirah-* sebagai pemegang otoritas pemerintahan di tingkat marga yang dalam batas-batas tertentu berperanan pula dalam bidang ekonomi seperti pasirah di daerah Cempaka yang bernama Mohammad Soleh. Bahkan pasirah ini sempat mendirikan semacam "bank prekreditasi" kepada para petani karet. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pasirah tidak hanya berkutat dalam masalah pemerintahan (birokrasi) semata.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal 106

¹⁶ *Ibid.*, hal 107

¹⁷ *Ibid.*,

Mengenai berapa jumlah orang-orang Cina yang berprofesi sebagai pedagang perantara di Palembang, tidak ada keterangan yang pasti. Berdasarkan statistik dan data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, para ahli sejarah maupun pakar ekonomi yang menganalisa masalah tersebut pada periode ini, salah satunya analisa dari Coppel, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.6. Bidang pekerjaan menurut kelompok etnik tahun 1930

Bidang Pekerjaan	Pribumi		Cina		Eropa	
	'000	%	'000	%	'000	%
Produksi bahan baku	14.193	70.0	145	30.8	19	22.0
Industri	2.105	10.4	94	20.0	5	5.5
Transportasi	291	1.4	13	2.7	11	12.9
Perdagangan	1.091	5.4	172	36.6	11	13.4
Bebas dan kesenian	150	0.7	7	1.5	11	13.2
Jasa	492	2.4	3	0.7	21	24.3
Lain-lain	1.958	9.7	36	7.7	7	8.7
Jumlah	1.958	100	470	100	85	100

Sumber: Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.46

Dari tabel diatas terlihat orang Cina yang menekuni lapangan perdagangan berjumlah 36% dari keseluruhan bidang pekerjaan yang digeluti oleh etnik ini. Bandingkan dengan kelompok pribumi yang hanya 5,4 % artinya orang Cina hampir 6 kali lipat lebih banyak menekuni bidang perdagangan. Meskipun dari tabel diatas tidak jelaskan berapa % orang Cina yang berprofesi sebagai pedagang besar, pedagang perantara ataupun perdagangan perantara kecil. Tetapi paling tidak kita bisa memperkirakan kondisi tersebut berlaku di wilayah Indonesia.

Mengenai jumlah pekerjaan yang diminati atau menguntungkan bagi orang Cina di pulau Jawa dan Madura serta Sumatera dan pulau-pulau lainnya di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.7. Pekerjaan Orang Cina dibidang yang menguntungkan tahun 1930

Bidang pekerjaan	Jawa & Madura		Sumatera		Pulau Lainnya		Jumlah	
	'000	%	'000	%	'000	%	'000	%
Produksi bahan baku	16.7	9.1	115.2	49.8	13.0	23.3	144.9	30.8
Industri	38.1	20.8	43.6	18.9	12.3	22.0	94.0	20.0
Transportasi	5.2	2.8	6.3	2.7	1.3	2.3	12.7	2.7
Perdagangan	105.4	57.7	42.1	18.2	24.4	43.7	172.0	36.6
Pekerjaan bebas & kesenian	3.9	2.1	2.3	1.0	1.1	1.9	7.2	1.5
Jasa	1.0	0.6	1.7	0.8	0.3	0.5	3.0	0.7
Lain-lain	12.6	6.9	19.9	8.6	3.5	6.3	36.1	7.7
Jumlah	182.9	100	231.1	100	55.9	100	469.9	100

Sumber: Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.46

Berdasarkan tabel diatas pekerjaan yang dianggap menguntungkan orang Cina di Sumatera , sektor perdagangan menempati tiga urutan besar yakni 18,2% . meskipun bila dibandingkan dengan profesi sejenis di pulau Jawa jumlahnya lebih kecil. Akan tetapi paling tidak hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa profesi perdagangan menjadi pekerjaan yang di sukai oleh orang Cina di pulau Sumatera, termasuk di Palembang.

Citra orang Cina yang lebih menyukai berprofesi sebagai pedagang biasanya terpadu dengan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Cara yang dilakukan oleh Coppel¹⁸ untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan dan standar kemakmuran antara pribumi, orang Cina dan Eropa yakni dengan melihat taksiran catatan statistik pajak pendapatannya, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

¹⁸ Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.46

Tabel. 8. Statistik Pajak Pendapatan Hindia Belanda menurut golongan penduduk tahun 1939

Jumlah orang yang ditaksir pendapatannya	Pribumi		Cina		Eropa	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di atas f.900	36.112	1.8	44.342	20.4	73.247	86.5
Antara f.200-f.900	562.155	27.7	147.127	67.8	10.375	12.3
Kurang dari f.200	1.434.077	70.6	25.647	11.8	1.000	1.2
Jumlah seluruhnya	2.032.344	100.0	217.116	100.0	84.622	100.0
Penduduk (1930)	59.138.067		1.190.014		240.162	

Sumber: Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.46

Berdasarkan tabel diatas terlihat kelompok etnik Cina sebagian besar memiliki pendapatan menengah keatas yakni 67,8% sedangkan orang-orang Cina yang berada di level bawah Cuma 11,8% dari keseluruhan jumlah orang Cina. Bandingkan dengan orang pribumi yang sebagian besar di level terbawah tingkat pendapatannya yakni 70,6 % sedangkan kelompok pribumi yang berada dilevel atas hanya berjumlah 1,8%, jumlah ini jauh dibawah orang Cina yang berada dilevel atas (20,4%). Sementara mayoritas yang menikmati kemakmuran adalah orang-orang Eropa, sebab sebagian besar yakni 86,5% orang Eropa berada di level teratas dalam hal tingkat pendapatnya

Gambaran statisistik yang dikemukakan oleh Coppel tidak sepenuhnya bisa diterima, apalagi diterapkan untuk menganalisa besaran dan jumlah orang Cina yang menekuni profesi perdagangan baik sebagai pedagang besar maupun sebagai pedagang kecil. Paling tidak data statistik tersebut membantu kita untuk memperkirakan jumlah serta kecenderungan dari pekerjaan orang Cina di Palembang.

B. Kultur Wirausaha dan Perilaku Bisnis Orang Cina

T. Hani Handoko mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga nilai yang sering disebut sebagai penentu kultur wirausaha dan perilaku bisnis golongan Cina secara umum, yakni : *hopeng*, *hong sui* dan *hoki*.¹⁹ Ketiganya merupakan nilai, kepercayaan, dan (mungkin) juga mitos yang dipakai untuk menjalankan bisnis. Ketiga nilai diatas mewarnai keberanian berspekulasi dalam menjalankan bisnis. Nilai-nilai tersebut akan diuraikan secara ringkas dibawah ini:

1. *Hopeng*

Hopeng adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis. Bagi orang Cina, bisnis tidaklah hal yang seluruhnya “rasional”, sehingga hubungan dengan relasi sangat penting. Sebagian besar perusahaan Cina merupakan perusahaan keluarga atau teman-teman dekat. Sebagaimana komentar Fleming dalam mengamati perilaku dagang pengusaha Cina di hindia Belanda sebelum kemerdekaan;

“Selama berabad-abad bangsa Cina mempunyai pandangan bahwa individu adalah sebagian dari keluarga, keluarga bagian dari *clan* dan *clan* bagian dari bangsa. Karena itu, dapat dimengerti mengapa dalam berdagang pengusaha Cina selalu bermitra dengan keluarga dan sahabatnya.²⁰

Karena itu, bisa dimaklumi mengapa bisnis orang Cina selalu berputar sekitar keluarga, *clan* atau etnik mereka sendiri. Bentuk usaha perkongsian (*hui*) tumbuh subur dikalangan Cina karena dianggap sebagai bentuk yang paling tepat untuk mewartahi kepentingan ekonomi keluarga, *clan*, atau bahkan bangsa. Tujuan seorang Tionghoa dalam mengepalai suatu kongsi atau perseroan adalah untuk menggalang kerjasama

¹⁹ T. Hani Handoko, *Tradisi (Manajemen) Dagang Ala Tionghoa*, dalam *Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Lembaga Studi Realino, 1996, hal 51-63

²⁰ J.L. Vleming, Jr, *Kongsi dan spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*, disadur oleh Bob Widyahartono, jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal 84.

dengan sesama anggota keluarga, kawan dekat mereka. *Hopeng* dalam hal berkisar diseputar relasi keluarga, suku dan bangsa.

Berbeda dengan pola bisnis orang Barat yang bertujuan memperkaya diri pribadi, orang Cina lebih mengutamakan kaum kerabat ketimbang dirinya sendiri. Dengan demikian urusan perkongsian bukan semata-mata urusan menjadi tulang punggung ekonomi, melainkan juga urusan emosional yang sering kali bahkan agak berbau *chauvinistic*. Dalam hal ini, perkongsian juga menyangkut martabat dan kejayaan *clan* atau keluarga. Seorang kepala keluarga biasanya adalah kakek atau *tsu-kung* memiliki pengaruh besar, orang-orang ini pada masyarakat Cina sangat dihormati oleh seluruh keluarganya. Bahkan ada perkiraan bahwa pengertian "*cukong*" saat ini yang bertindak sebagai boss atau pemberi modal berasal dari pengertian *tsu-kung*.²¹

Akan tetapi dalam bisnis dikalangan Cina sampai saat ini, khususnya yang bisa dilihat di Indonesia, istilah *hopeng* tidak hanya menyangkut kalangan keluarga *clan* atau bangsa. Banyak bukti yang bisa dilihat bahwa *hopeng* juga memasukan "kenalan" yang memudahkan urusan bisnis. Teman baik, khususnya yang memiliki pengaruh kekuasaan politik, juga termasuk dalam lingkaran *hopeng*, sebagai contoh sebagaimana dikemukakan oleh nara sumber kami (Bapak Hasan Hambali) di Palembang beliau menuturkan sebagai berikut:

"Kalau orang Cina memiliki kenalan seorang pejabat penting, misalnya pejabat yang memiliki akses ke pusat kekuasaan misalnya seorang gubernur. Ia akan didukung oleh saudara mereka, meskipun dalam anggota keluarga ia bukanlah yang tua dari segi silsilah keluarga. Akan tetapi demi mencapai tujuan agar usaha dagangnya dikemudian hari berjalan lancar, maka yang bersangkutan dihormati dan dijadikan pemimpin bagi keluarganya."²²

²¹ Melly G.Tan dalam G.Y. Adicondro, *dari Pecinan sampai Nan Yang: Suatu Introduksi tentang Kewiraswastaan Orang Cina di Indonesia*, dimuat dalam Prisma, No.9 (Oktober) 1978, hal 16

²² Wawancara dengan Hasan Hambali di Palembang tanggal 17 Agustus 2004

Berdasarkan pernyataan diatas kita bisa menafsirkan bahwa nilai budaya *hopeng* tidaklah selalu didasarkan senioritas. Akan tetapi sebagaimana penjelasan tersebut diatas unsur kepentingan keluarga tetap menjadi priorotas utama seperti pendapat nara sumber tersebut. Bahkan dalam skala Nasional kita mendengar perjalanan bisnis para Konglomerat masa lampau seperti Oei Tiong Ham (Raja Gula) sebagaimana perantau Cina yang datang ke Indonesia. Ia telah mulai merintis usaha bisnisnya sejak akhir abad ke-19, Oei Tiong Ham merupakan potret *Konglomerat* yang reputasinya cukup disegani oleh pemerintah kolonial.²³ Bisnis gula merupakan bisnis semula dirintisnya, dari bisnis inilah kemudian usahanya merambah ke usaha lain. Memang belum ada data tertulis mengenai pengaruh nilai budaya *hopeng* berpengaruh pada orang Cina di Palembang, baik pada Kesultanan maupun sampai berakhirnya kekuasaan kolonial di Indonesia. Akan tetapi kalau kita melihat kembali pernyataan Sevenhoven²⁴ yang menggambar orang Cina pada Kesultanan merupakan mitra dagang Sultan, bahkan hubungan baik dengan Sultan di perkuat dengan adanya orang Cina yang diberi gelar kebangsawan (Demang) oleh Sultan .

Pada masa permulaan kolonial dan mungkin sampai berakhirnya kekuasaan kolonial di Palembang. Nilai budaya *hopeng* tetap terpelihara buktinya jaringan perdagangan dari tingkat lokal sampai regional (Singapura) yang menguasai pasar karet di Palembang pada dekade abad ke-20 semua dipegang oleh orang Cina.

Dari uraian diatas secara singkat bisa dikatakan bahwa yang menjadi *hopeng* tidaklah selalu keluarga, *clan* atau bangsa seetnik. Akan tetapi bisa juga relasi politik dengan pejabat politik dan penguasa setempat seperti Sultan atau penguasa kolonial.

²³ Melly G. Tan, *op.cit*

²⁴ Sevenhoven, *op.cit*, hal.36

Jadi yang utama bagi orang Cina konsep kebudayaan –hopeng- bisa disiasati atau diadaptasi menjadi tujuan untuk mencapai kejayaan secara ekonomi dan politis.

Jelasnya bahwa karakter dagang menuntut sikap “bijak” dan kecermatan. Mencari dan menjalin hopeng adalah cerminan dari sikap kehati-hatian. *Hopeng* adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko bisnis yang sering bersifat sangat spekulatif. Bisa juga diartikan bahwa *hopeng* merupakan usaha untuk mengurangi rintangan-rintangan dagang.

2. Hong sui

Kepercayaan terhadap *hong sui* adalah kepercayaan pada faktor-faktor alamiah yang menunjang nasib baik dan nasib buruk manusia. *Hong sui* menunjukkan bidang-bidang atau wilayah yang sesuai dengan keberuntungan baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam peruntungan dalam perdagangan. Seperti misalnya, peruntungan sebuah rumah memerlukan perhitungan-perhitungan rumit dari para ahli *hung sui* agar rumah tersebut membawa rejeki bagi yang memakainya. Dengan teori *geomancy* yang rumit, keberadaan sebuah tempat bisa disesuaikan dengan waktu dan suasana.

Bagi masyarakat Cina, *hong sui* dapat menerangkan hubungan kunci antara manusia dengan alam. Hubungan kunci tersebut tidak lain merupakan nafas atau semangat dari alam semesta yang disebut *c'hi*. Dalam bahasa mandarin *c'hi* tidak hanya sekedar hawa melainkan juga mengandung pengertian kekuatan hidup, karakter atau sifat. Andaikata *c'hi* tidak mengalir lancar, bisa jadi kebahagiaan manusia pun bisa terganggu.

Dalam menerapkan *hong sui* masyarakat Cina sangat percaya terhadap keseimbangan baik dan buruk, laki-laki dan perempuan, api dan air, terang dan gelap

dan lain sebagainya. Pada prakteknya keseimbangan ini adalah keseimbangan antara *Yin* (gelap, pasif, wanita, tanah, bulan, harimau, penguasa dingin, lembut, mematikan, angka ganjil, negatif) dengan *Yang* (terang, aktif, pria, matahari, hangat, naga, angka genap, positif). Kualitas *Yang* digambarkan dengan gunung serta tanah yang tinggi, sementara kualitas *Yin* digambarkan dengan lembah, sungai dan air. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Oleh sebab itu keberadaan *Yin* dan *Yang* saling tergantung satu sama lain. Sebagai contohnya adalah nasib manusia, bila seseorang mengalami nasib buruk pasti pada suatu saat akan mengalami nasib pula, demikian pula sebaliknya.

Yang terpenting untuk diperhatikan adalah *Yin* dan *Yang* akan terus menerus berinteraksi serta membawa perubahan. Oleh karena itu orang dituntut untuk selalu waspada terhadap perubahan dan selalu siap menghadapi akibat dari perubahan tersebut. Sementara energi yang menghidupkan kedua prinsip adalah *c'hi*. Bila *c'hi* semakin berkembang, maka *Ying* dan *Yang* akan berkembang pula, saling berinteraksi dan keberadaannya sesuai dengan prinsip hukum alam yang tetap. Hukum inilah yang diamati dan menjadi tradisi matematis masyarakat Cina.

Hal-hal seperti ini sangat berpengaruh pada praktek dagang orang Cina, termasuk pula di Palembang. Contoh mengenai sejauh mana *hong sui* dipercaya oleh orang Cina di Palembang, sebagaimana penuturan Bapak Hambali dibawah ini:

“Ada kenalan kami waktu kecil yang ingin menjalankan usaha bengkel sepeda. Ia berkeliling dengan angkutan yang didalamnya sudah dipersiapkan bahan dan alat untuk membuka usaha ini. Ketika menemukan jalan persimpangan tertentu yang dirasa sesuai menurut perhitungan dia (mungkin) ilmu *hong sui* ia akan menyewa tempat tersebut untuk tempat usaha ini. Karena merasa sesuai dengan letak tempatnya maka ia dengan cara yang halus akan mengambil tempat itu dengan cara memberi pinjaman ketika sipemilik tempat tersebut sewaktu butuh

uang. Maka ketika siempunya tanah sudah terjerat hutang, maka tak mau akan menjual tempatnya ke teman saya ini.”²⁵

Dari ilustrasi yang dikemukakan informan diatas terlihat bagaimana upaya orang Cina berusaha mencari tempat yang memiliki faktor *hong sui* yang baik. Setelah dapat dengan segala cara ia akan berusaha untuk memiliki tempat itu meski dengan cara atau strategi yang halus.

Praktek-praktek *hong sui* seperti itu sesungguhnya dalam sistem kultural mampu membuat perhitungan yang sangat hati-hati dan akurat dalam menjalankan bisnis. Setiap ramalan, tentu saja boleh dianggap tidak rasional, sesungguhnya tidak pernah berakibat apa-apa terhadap dagang. Hanya saja, ramalan itu penting untuk menambah kewaspadaan dalam menjalankan dagang.

Setiap ramalan atas nasib baik menuntut pembuktian dan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu masyarakat Cina sangat hati-hati dalam berdagang, baik dagang yang diramalkan memiliki prospek cerah dan bagaimana seandainya ramalan tersebut tidak terwujud. Tentu saja segala daya upaya diusahakan untuk menghindari keadaan kacau-*chaos*-dan nasib buruk semua sisi kehidupan, termasuk dalam berdagang. Disinilah masyarakat dagang Cina dituntut agar berhasil menyiasati ramalan-ramalan tersebut dan berusaha mematuhi aturan-aturan yang terdapat didalamnya.

3. Hoki

Nilai yang satu ini masih memiliki kaitan dengan unsur sebelumnya (*hong sui*). Hokie merupakan peruntungan dan nasib. Para pengusaha keturunan Cina pada

²⁵ Hambali, op.cit

umumnya memegang suatu konsep pengelolaan risiko (*managing risk*) yang diatasi dengan melakukan suatu pengelolaan nasib atau takdir (*managing destiny*) melalui *hong sui*, sehingga terlihat bahwa hokie lebih dipersepsikan merupakan bentuk usaha orang untuk tidak menyerah atau terpaku pada nasib yang cenderung fatalistik. Hokie dalam hal ini dipandang merupakan cara atau strategi dalam mensiasati kehidupan bagi orang Cina.

Hambali Hasan menuturkan persoalan mengenai *hokie* yang dipercaya orang Cina, menurut pengetahuan dan pengalaman selama bergaul dengan teman-temannya ketika masih sekolah, berikut petikan wawancara dengan beliau;

“Teman kami ketika sama-sama sekolah di SR (maksudnya SD) pernah mengatakan ketika memulai usaha dagang empek-empek, berulang kali mengalami kerugian, ia tak bosan-bosannya mencoba terus, baik dengan mencari tempat yang menurutnya punya nilai keberuntungan sampai memperbaiki resep masakan. Setelah berusaha keras akhirnya kini menjadi pengusaha empek-empek yang sukses di Jakarta.”²⁶

Ilustrasi diatas secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberhasilan dagang orang Cina tidak hanya ditentukan oleh nasib belaka ataupun tempat yang strategis semata sebab pada intinya keberanian, usaha keras serta berhati-hati dalam melakukan spekulasi merupakan cara terbaik menghindari kerugian atau nasib buruk.

Selain ketiga nilai diatas masih beberapa nilai yang menjadi panutan orang Cina dalam menjalankan bisnis adalah *guanxi* atau kepercayaan. Berbeda dengan masyarakat Jawa atau mungkin orang Melayu yang umumnya tidak bernilai resiko dan mendasari usaha dagang dengan prinsip menjaga harmoni sosial. Maka orang Cina secara nyata berani mengambil resiko dalam berdagang. Perbedaan tak lain kultur budaya mereka yang mengelaborasi dan memberikan apresiasi positif kepada kesediaan mengambil

²⁶ *Ibid.*,

resiko. Iwan Dzulvan Amir²⁷ menyatakan unsur kepercayaan dimaknai berbeda tergantung sejauh mana sistem budaya dari masyarakat tertentu menampung atau mengelaborasi nilai ini. Dalam tulisan mengenai *guanxi* dan konsep kepercayaan antara orang Cina dan Jawa, ia berpendapat bahwa masyarakat Jawa lebih mementingkan unsur kepercayaan diletakkan dalam nuansa keseimbangan masyarakat yakni antara individu dengan masyarakat banyak. Sedangkan orang Cina memandang kepercayaan berdasarkan pada sejauh mana seseorang mampu mempertahankan relasi sosial dalam waktu lama.²⁸

Berkaitan dengan konsep kepercayaan dalam berdagang orang Cina Palembang, yang penulis temui dari hasil wawancara baik dengan pemuka adat maupun masyarakat merupakan hal mendasar ketika seseorang dalam menjalankan praktek dagang. Pak Partawijaya²⁹, demikian ia memperkenalkan diri kepada penulis, ia menjabat sekretaris pada rumah peribadatan Cina di kampung 7 Ulu. Pak Partawijaya meskipun orang Cina ia pernah bekerja sebagai PNS yakni menjadi guru. Ia menuturkan konsep kepercayaan dalam hal berdagang sebagai berikut:

“ Hubungan bisnis dan perdagangan yang dilakukan sesama orang Cina pada umumnya hanya dilandasi oleh saling percaya diantara mereka. Karena sebagian besar relasi bisnis masih kerabat atau kenalan baik, bahkan tidak seperti perusahaan yang menerapkan konsep manajemen dengan administrasi dan pembukuan yang tertib. Kami orang Cina melakukan dengan itikad dan landasan kepercayaan semata. Bila di toko kebetulan ada pembeli yang menginginkan barang tak kami tidak punya, maka kami akan meminjam teman atau kerabat yang memiliki stok barang itu, begitu pula sebaliknya. Hubungan saling percaya tidak perlu lagi dikuat dengan ikatan kontrak secara hitam diatas putih. Akan tetapi cukup melalui perilaku untuk saling menepati janji sesuai dengan pembicaraan sebelumnya.”

²⁷ Iwan Dzulvan Amir, *A Trust Theory Analysis of Two Ideologies*, Part 2: Priyayi, dimuat dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Edisi Mei-Agustus, No-62, 2000, hal 75-81.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Wawancara dengan Partawijaya di Palembang, tanggal 17 agustuss 2004

Penjelasan diatas paling tidak memberikan gambaran kepada kita tentang sejauh mana orang Cina termasuk yang tinggal di Palembang untuk selalu menepati janji baik dalam pengambilan barang maupun pembayarannya kemudian. Nilai –nilai diatas sudah mereka tanamkan kepada anak-anak mereka sejak mereka masih kanak-kanak..

Nilai yang cukup penting selain ketiga nilai diatas dan *guanxi* adalah keuletan dan ketekunan orang Cina di dalam mengembangkan bisnis perdagangannya. Berkaitan dengan sikap mental ulet and tekun, dibawah ini penuturan dari Bapak Johan Hanafiah, seorang sejarawan dan pengamat budaya di Palembang, kepada kami sebagai berikut:

” Dulu waktu saya masih kanak-kanak, ada tetangga kami yang kebetulan beliau dari kalangan keluarga Cina miskin. Setiap pagi ia mendatangi rumah kami hanya untuk mengambil (maaf) kotoran manusia dari jamban rumah kami. Ia membawa ember dan timba serta pikulan untuk mengangkut hadast orang untuk dijadikan di kebun milik orang tuanya. Kami cukup respek dengan orang in tidak segan-segan dan tanpa malu melakukan pekerjaan tersebut. Kini orang Cina tetangga kami tersebut telah menjadi orang sukses, bahkan ia telah memiliki rumah dan tanah yang banyak di Palembang.”³⁰

Dari keterangan wawancara di atas kita bisa menggambarkan betapa orang Cina ketika hidupnya masih susah mereka bersedia melakukan pekerjaan apapun agar tetap bisa bertahan hidup. Pekerjaan yang menurut pandangan kita hina, bagi mereka tidak menjadi persoalan bahkan mereka tidak pernah berputus asa. Ulet dan gigih itulah yang kita bisa nilai dari penjelasan diatas.

Keberhasilan orang-orang Cina di Palembang dalam menjalani profesinya sebagai pedagang, baik pedagang besar atau pedagang kecil, secara kultural banyak didukung dari akar budaya mereka yang cenderung mengarah pada hal-hal yang bersifat materi (kekayaan), meskipun unsur-unsur subyektifitas seperti kebijakan penguasa juga turut berperanan pula, baik pada masa Kesultanan Palembang maupun masa kekuasaan kolonial.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Johan Hanafiah di Palembang, tanggal 18 Agustus 2004 di Palembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jaringan perdagangan etnik Cina di Palembang pada permulaan abad ke-20, sampai berakhirnya kolonial, bukanlah periode di mana orang-orang Cina di Palembang mulai mengawali menekuni profesi ini. Bahkan profesi sebagai *middleman* (perdagangan perantara) telah dijalankan oleh orang Cina jauh sebelum Palembang mengalami proses kapitalisasi, industriliasasi dan komersialisasi dalam bidang pertanian (kopi dan karet) yang berkembang pesat pada periode awal abad ke-20. Jauh pada periode sebelumnya yakni pada masa Kesultanan Palembang orang-orang Cina dan orang-orang Arab di Palembang telah berperan sebagai penghubung (perantara) bagi pihak Kesultanan dengan para pedagang asing dalam aktifitas perdagangan.

Palembang sebelum permulaan abad ke-20 bukanlah daerah yang dilirik oleh penguasa kolonial dalam konteks kepentingan ekonominya. Arti strategis Palembang bagi pemerintah kolonial mulai tampak, setelah di temukannya sumber-sumber daya ekonomi seperti minyak bumi dan tambang lainnya seperti batu bara, timah serta hasil pertanian seperti kopi dan karet.

Palembang memasuki dasa warsa abad ke-20 di anggap sebagai daerah-untung (*wingesweten*). Bahkan pada dekade kedua dari permulaan abad ke-20, masa ini oleh penduduk setempat disebutnya sebagai masa *oejan emas*, karena berkat kemakmuran yang diperoleh dari komoditas seperti karet penduduk pribumi mengalami proses transformasi sosial ekonomi yang progresif, yang diindikasikan dengan banyaknya penduduk pribumi yang menunaikan ibadah haji serta memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang konsumtif yang didatangkan dari pulau Jawa.

Kebijakan kolonial yang diskriminatif terhadap penduduk pribumi dan orang Arab bila dibandingkan terhadap orang Cina, maka akibat dari kebijakan kolonial tersebut, secara politik dan ekonomi orang Cina di Palembang lebih diuntungkan. Posisi yang diperoleh oleh Cina tidak sepenuhnya menyebabkan mereka menguasai sektor perdagangan, sebab tanpa adanya kultur dan jiwa wirausaha yang kuat mereka belum tentu mereka menjadi dominan dalam sektor perdagangan perantara.

Permulaan abad ke-20 dalam perspektif Mestika Z, juga dipandang sebagai masa tumbuhnya profesi kepialang berdasarkan ikatan etnis. Kemunculan kelompok pedagang-pengusaha Barat yang beroperasi di Palembang seperti *Borsumij* (ekportir karet), *Eccompto* (importir barang-barang mewah), NHM (perbankan) dan *Hogemijer* (produsen makanan dan minuman). Kelompok-kelompok swasta Barat di Palembang lebih banyak bermitra dengan pemerintah, bahkan kelangsungan dan kesinambungan usahanya tergantung dari kemurahan penguasa.

Berbeda dengan orang Cina yang cenderung bertindak sebagai agen perantara, yang lebih menyandarkan kepada kemampuan berdagang berdasarkan pengalaman dan intuisi mereka yang diperoleh secara turun-temurun. Kelompok pedagang-pengusaha Cina di Palembang bergerak di bidang usaha transportasi dan penguasaan komoditas karet, seperti *Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi* (transportasi) dan *NV Palembang RubberI* (karet).

Jaringan perdagangan perantara Cina di Palembang berkembang dan beroperasi mulai dari lingkup dusun, kota sampai ke lingkup nasional dan regional, yakni dari dusun di daerah pedalaman Palembang sampai ke Singapura. Mereka memiliki para *tengkulak* yang beroperasi di dusun sampai para *-tauke-* juragan yang memiliki kapital besar.

Akan halnya perdagangan pribumi ada beberapa pedagang pengusaha yang cukup sukses seperti H. M. Akil dengan Firma Haji Akil dan H. Anang dengan Firmanya H. Anang. Selain kedua tokoh diatas masih ada beberapa pribumi yang cukup menonjol baik secara perorangan maupun dalam bentuk firma. Pengusaha pribumi antara lain: H. Asya'ri seorang pedagang sekaligus pemborong bangunan, Haji Ali pedagang karet di seberang 1 Ulu dan Haji Jamaludin dengan perusahaannya *Firma Toko Bali*.

Sebagai kelompok masyarakat perantau orang-orang Cina di Palembang sebagaimana umumnya orang Cina di Indonesia, secara psikologis mereka diperhadapkan dengan persoalan untuk mengatasi kesulitan hidup dan bagaimana cara mensiasatinya agar tetap *survival* dalam masyarakat. Landasan kultural yang dimiliki oleh warisan leluhur mereka yakni' berupa nilai dan perilaku bisnis yang bersumber dari ajaran-jaran filosofi Kung Fu Tze yang secara eksplisit menyokong dan lebih mengutamakan kepentingan duniawi, maka nilai-nilai seperti *hopeng*, *hong-sui* dan *hokie* merupakan manifestasi dari ajaran ini.

Nilai-nilai dalam perilaku bisnis seperti *hopeng* (menjaga hubungan baik dengan relasi), *hong-sui* (kepercayaan alamiah yang menunjang nasib baik dan buruk) dan *hokie* (faktor keberuntungan). Serta sifat ulet dan gigih dalam berusaha merupakan nilai utama dalam perilaku bisnis orang Cina.

B. Saran

Pelajaran yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa tumbuh dan berkembangnya mental dagang yang dimiliki orang di Palembang Cina tidak semata-mata karena warisan sejarah belaka. Bahwa kekuasaan politik penguasa dalam

menentukan kemajuan perdagangan sekelompok etnik tertentu bukanlah premis yang kebenaran mutlak untuk diakui secara keseluruhan. Akan tetapi yang lebih utama adalah kultur dan perilaku yang dimiliki orang-orang Cina dalam menjalani profesi yang memang disokong oleh landasan budaya mereka yang mendukungnya, yang telah terinternalisasi atau tertanam kuat sejak mereka masih kanak-kanak, hal inilah sepatutnya kita contoh.

Daftar Pustaka

- Ari, Kemas, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: Forum Pengkajian Sosial Budaya, 2003
- Abdullah, Makmun dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri* Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985
- Al Qurtuby, Sumanto, *Arus Cina-Islam-Jawa, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara Abad XV & XVI*, Yogyakarta : INSPEAL Press, 2003.
- Amir, Dzulvan Iwan, *A Trust Theory Analisis of Two Ideologies, Part 2: Priyayi*, Jakarta: Jurnal Antropologi UI, Edisi Mei-Agustus No.62, 200
- Coppel, Charles, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994
- Bigalke, Terry, "The Oral History Methode", dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta: Lembaran Berita ARNAS , No.9 Oktober 1982 .
- Djoned Poesponegoro, Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Giok, Tjan, Siau, *Lima Jaman Perwujudan Integrasi wajar*, Jakarta-Amsterdam: Teratai, 1984
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahaan Noegroho Notosoesto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hanafiah, Djohan, *Melayu – Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Handoko, T.Hani, "Tradisi (Manajemen) Dagang Ala Tionghoa, dalam *Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Lembaga Studi Realini, 1996
- Isakandar, T, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme Sampai nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Koentjaraningrat, "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu" dalam (Koentjaraningrat,ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.

- Lohanda, Mona, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.
- Lembaga Studi Realino, *Penguasa Dan Siasat Pengusaha*, Yogyakarta: Kanisius, 1986
- O'Malley, William Joseph, *Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di tahun 1930-an*, dalam Prisma Edisi Agustus No.8, Jakarta: LP3Es, 1983
- Ongkoham, *Merosotnya Peranan Pribumi dan perdagangan Komoditi*, dalam Prisma Edisi Agustus No.8, Jakarta: LP3Es, 1983
- Purwanti, Retno, *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002
- Purwanto, Bambang, "Migrasi dan Kesempatan Kerja: Persoalan Tenaga Kerja Dalam Perkebunan Karet, kumpulan makalah Konggres Nasional Sejarah, Sub-tema: *Dinamika Sosial Ekonomi III*, Jakarta: Depdikbud, 1997
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1995
- Sevenhoven, J.L, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*, terjemahan Sugarda Purbakawartja, Jakarta: Bharata, 1971
- Siswoputranto, *Perkembangan Karet Internasional*, Jakarta: LEPPENAS, 1981
- Soeryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Graffiti Press, 1984.
- , *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1986.
- , *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Stibbe, D.G, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Leiden: 'sGravenhage Jilid III, 1919
- Sulaiman, Satyawati, *He Archeaology and History of West Sumtra*, Jakarta: Bulletin Penelitian Arkenas, 1977
- Taim, Eko Asih Putriana, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002
- Toer, Pramoedya Ananta, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta : Garba Budaya, 1988.

- Twan Djie, Twiem, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Shiraishi, Takashi, "Zaman Bergerak", *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafiti Press, 1997.
- Wardoyo, T.S, *Tan Jin Sing dari kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia, 1981
- Wibowo, I, *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001
- , *Retrospeksi dan Rekonstekstualisasi, Masalah Cina*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Wellan, J.W.J, *Zuid-Sumatra, Economisch Overzicht van de Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Disctricten en Benkolen*(Wageningen: H. Veenman 7 Zoon), 1932.
- Wertheim, W.F, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana Pustaka, 1999.
- Wolters, O.W, *The Fall of Sriwijaya in Malay History*, Singapura: Oxford University Press, 1970
- Vasanty, Puspa, "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia", dalam (Koentjaraningrat,ed), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1980
- Vlemming, J.R, *Kongsi dan Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*, disadur oleh Bob Widyaharto, Jakarta: Gramedia, 1989
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- , "The Dualistic Economy of Palembang in late Colonial Periode", Editor Thomas J.Linblad, *Historiva foundation of national economy in Indonesia, 1890s-1900-s*, North-Hollands Akademie van Wetenschappen Verhandeling, Afd Letterkunde, Nieuwe, deel 167, 19967

Daftar Informan

1. Nama : Hambali Hasan, SH
Umur : 63 Tahun
Pendidikan: Sarjana
Pekerjaan : Pensiunan PNS , ketua Badan Musyawarah Adat Propinsi Sumsel
Alamat : Palembang

2. Nama : Djohan Hanafiah
Umur : 65 Tahun
Pendidikan: Sarjana
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palembang, Budayawan dan Sejarawan
Alamat : Palembang

3. Nama : Princepes Partawijaya
Umur : 58 Tahun
Pendidikan: SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Palembang

4. Nama : Dra. Nurhayati
Umur : 45 tahun
Pendidikan: Sajana
Pekerjaan : Kasubdin Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Budaya Propinsi Sumsel
Alamat : Palembang

5. Nama : Wilson
Umur : 23 Tahun
Pendidikan: SMA
Pekerjaan : Mahasiswa, Cicit Kapitan Tjoa (Kapiten Cina di Palembang)
Alamat : Palembang

Lampiran



Foto.1
Rumah Kapiten Cina Terakhir Palembang di Kampung 7 Ulu



Foto.2
Ruang tengah tempat menerima tamu di kediaman rumah
Kapiten Tjoa di Kampung 7 Ulu



Foto.3
Kamar tempat peribadatan dan tempat menyimpan abu leluhur
di rumah Kapiten Tjoa di Kampung 7 Ulu



Foto 4.
Komplek Perumahan disekitar rumah Kapiten Tjoa di
Kampung 7 Ulu



Foto.5
Potret Kapiten Tjoa beserta anggota
keluarganya



Foto.6
Kelenteng Soei Goeat Kiong merupakan kelenteng tertua di Palembang di sekitar Kampung 7 Ulu

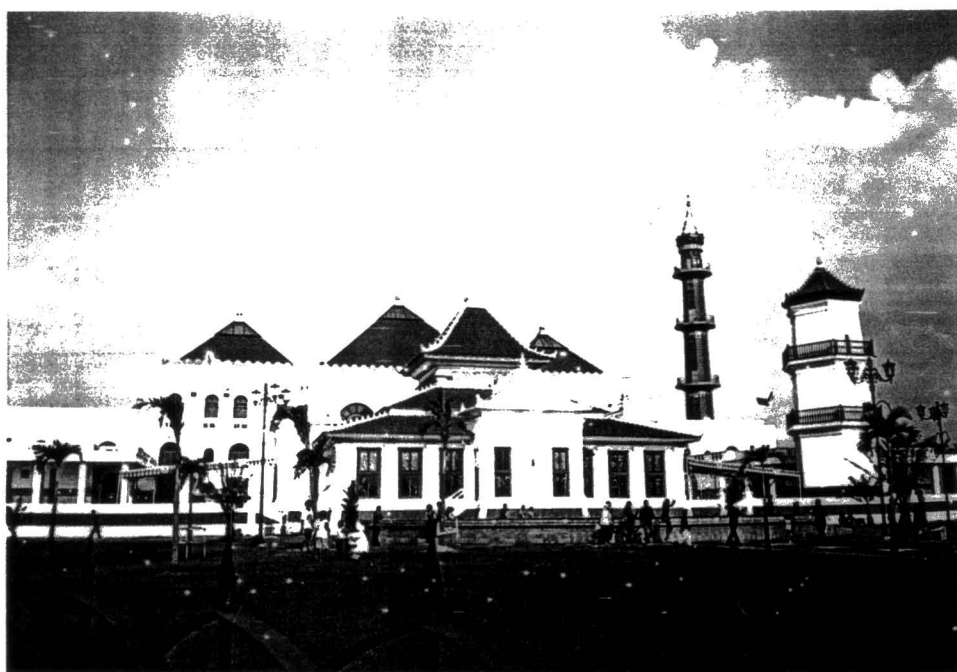


Foto.7
Mesjid Agung Palembang yang dibangun pada masa Sultan Badaruddin II



Foto.8
Benteng Kuto Besak yang dibangun pada masa Kesultanan
Palembang

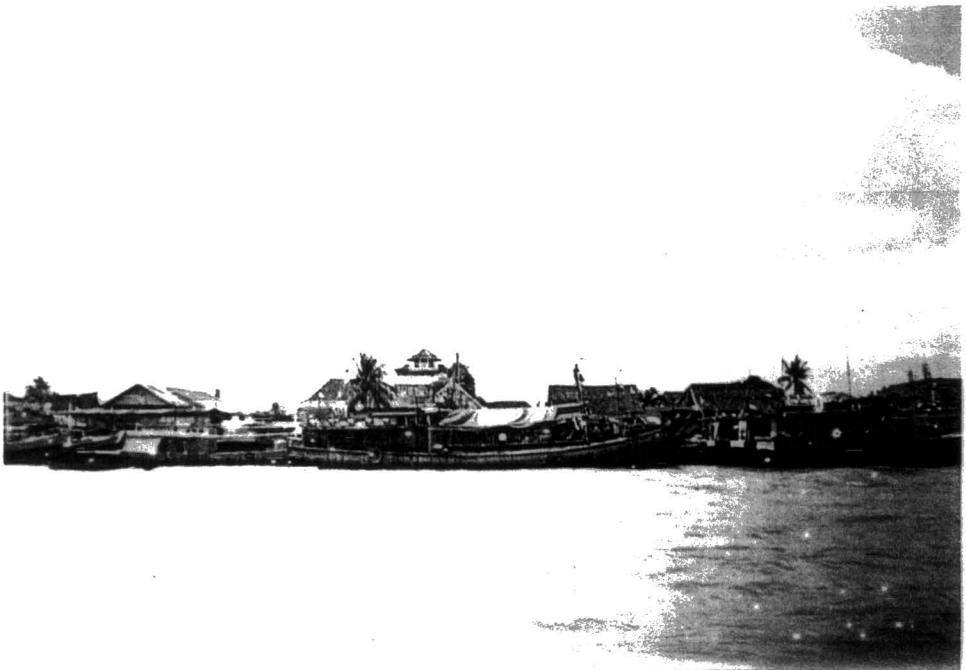


Foto.9
Pemandangan pemukiman Cina di Kampung 7 Ulu dilihat dari
seberang Sungai Musi Musi



Foto.10
Bapak Hambali Hasan, SH saat ini menjabat sebagai
pengurus Badan Musyawarah Adat Prop. Sumatera Selatan

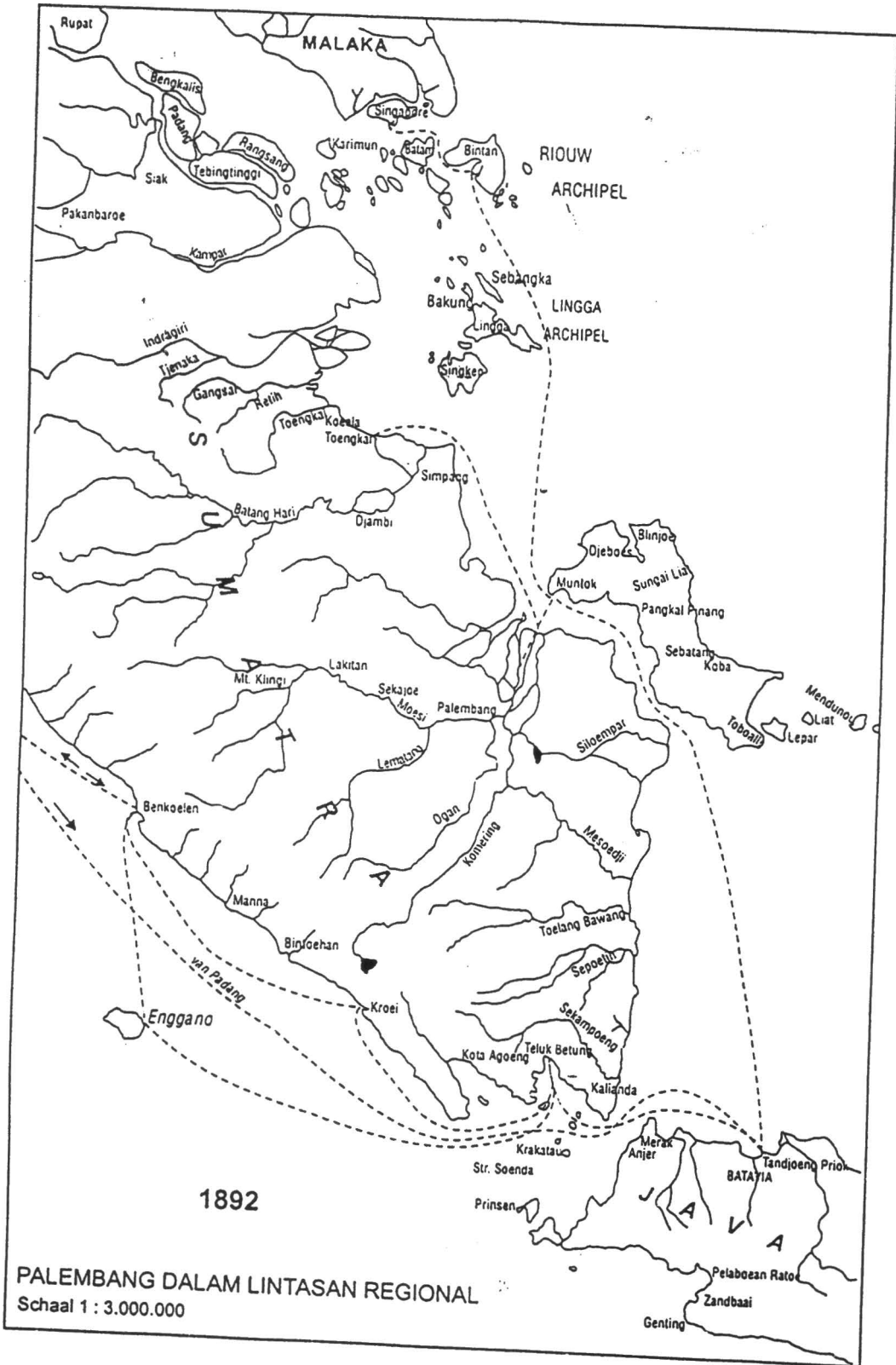


Foto.11
Bapak Djohan Hanafiah pemerhati budaya dan sejarawan Palembang



Foto 12.
Bapak Princepes Partawijaya sekretaris kelenteng
Soei Goeat Kiong

Peta Palembang Tahun 1892



Sumber: Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal Lampiran

